



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) 2021
KABUPATEN KAMPAR**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalaamu'alaikum Wr. Wb,*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Pemerintah Kabupaten Kampar.

Secara substantif Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan media melaporkan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kampar. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKj Pemerintah Kabupaten Kampar juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja Pemerintah serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKj Pemerintah Kabupaten Kampar ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar ini masih terdapat banyak kelemahan dan harus menjadi pemicu bagi segenap komponen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

Bangkinang,

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	13
1.3 Masalah-masalah dan Isu-isu Strategis Pembangunan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	39
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	40
2.1 Rencana Strategis	40
2.2 Visi-Misi Kabupaten Kampar	41
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	44
2.4 Perjanjian Kinerja	55
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	60
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar.....	60
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	60
3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja	62
B. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan	114
BAB IV. PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Kelurahan dan Desa se Kabupaten Kampar	12
Tabel 2.1 : Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017-2022	44
Tabel 2.2 : Sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022	47
Tabel 2.3 : Keterkaitan Misi, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar 2017-2022	56
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja	61
Tabel 3.2 : Pencapaian Target Misi	63
Tabel 3.3 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1	64
Tabel 3.4 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2	66
Tabel 3.5 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 3	68
Tabel 3.6 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 4	70
Tabel 3.7 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 5	71
Tabel 3.8 : Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 6	74
Tabel 3.9 : Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1	77
Tabel 3.10 : Nilai Tukar Petani Gabungan Provinsi Riau Desember 2021 (2018 = 100)	78
Tabel 3.11 : Nilai Tukar Petani Gabungan Provinsi Riau Desember 2021	79
Tabel 3.12 : Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2	80
Tabel 3.13 : Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) FAO dan Nasional	81
Tabel 3.14 : Pola Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kampar Berdasarkan Skor PPH Tahun 2021	82
Tabel 3.15 : Skor PPH 2019-2021 dan Proyeksi PPH Tahun 2022-2025 Kabupaten Kampar	83
Tabel 3.16 : Proyeksi PPH Berdasarkan Kontribusi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (% AKE) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025	84
Tabel 3.17 : Proyeksi PPH Berdasarkan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (Kkal) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025	85
Tabel 3.18 : Proyeksi PPH Berdasarkan Rata-Rata Konsumsi Pangan Menurut Kelompok Bahan Makanan (Gram/Kap/Hari) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025	86

Tabel 3.19	: Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 3	88
Tabel 3.20	: Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 4	90
Tabel 3.21	: Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1	91
Tabel 3.22	: Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2	93
Tabel 3.23	: Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3	94
Tabel 3.24	: Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1	96
Tabel 3.25	: Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMA/PMDN Tahun 2021 (Setelah dikonversi ke Rupiah)	97
Tabel 3.26	: Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha, Investasi PMA/PMDN Tahun 2021 (Setelah dikonversi ke Rupiah)	97
Tabel 3.27	: Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2	98
Tabel 3.28	: Jumlah Badan Usaha Mulik Desa (BumDesa) yang aktif	105
Tabel 3.29	: Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1	107
Tabel 3.30	: Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2	108
Tabel 3.31	: Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3	109
Tabel 3.32	: Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 1	111
Tabel 3.33	: Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 2	112
Tabel 3.34	: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021	115
Tabel 3.35	: Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021	117

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 : Angka Harapan Hidup	67

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 ditujukan untuk menyampaikan capaian kinerja strategis oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam tahun 2021, dalam bentuk capaian pada masing-masing indikator kinerja, meliputi kinerja sasaran dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Variabel tersebut sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 dalam bentuk visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya secara lebih terinci dituangkan kedalam Program, indikator kinerja serta target capaian kerja serta kerangka pendanaan setiap tahunnya.

Analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2021 disajikan untuk setiap program yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar dan telah dianggarkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang jelas dan terukur sehingga mampu memberikan daya dorong untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Kampar dimasa yang akan datang. Adapun hal-hal pokok dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Kampar terdiri dari 6 isu sentral.

Bidang Sumber Daya Manusia yaitu menyiapkan SDM yang handal dan profesional, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi.

Bidang perkenonomian, yaitu mengembangkan pertanian yang moderen dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan, mengoptimalkan fungsi kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan, meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan. Selanjutnya melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air, meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif serta meningkatkan kelembagaan hukum adat.

Bidang Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas dan proporsional dengan tujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi, serta mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai.

Bidang Usaha dan Investasi yaitu Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tujuan, meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha, meningkatkan daya saing daerah, mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUMK) dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan profesional.

Bidang pariwisata yaitu Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju, dengan tujuan mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif dan berkarakter lokal, meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata, dan masyarakat sadar wisata, memperkuat sinergi masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan event dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif dan berkarakter lokal, meningkatkan promosi wisata daerah. Selanjutnya bidang ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah, mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing, meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah dan industri besar.

Bidang kehidupan beragama yaitu Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani serta membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya.

Bidang Kinerja Keuangan target pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 2.541.147.951.540,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.480.930.457.820,76 (97,63%). Bila dilihat dari realisasi Pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.364.490.612.380,33 realisasi pendapatan tahun 2021 naik Rp. 116.439.845.440,4. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.502.013.633.916,14 (94,51%) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.647.390.998.717,00, terjadi penurunan dibanding dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.146.840.195.83.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

A. GEOGRAFIS

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar Ibukotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan Ibukotanya Pangkalan Kerinci dan Kabupaten Rokan Hulu Ibukotanya Pasir Pengarayan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar berjarak \pm 61 KM dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Bab IV Urusan Pemerintahan bagian kesatu klasifikasi urusan Pemerintahan pasal 9 sampai pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Akuntabilitas yaitu:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

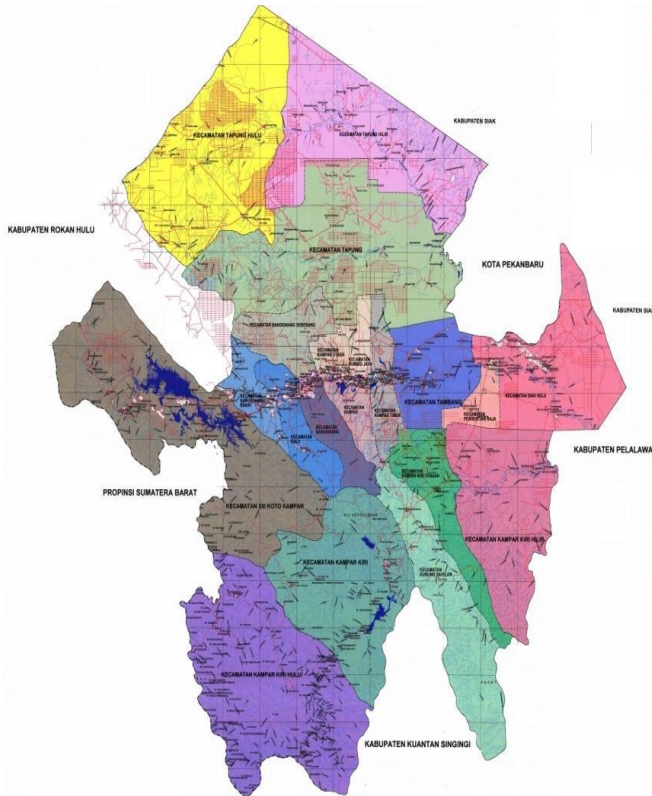
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;

- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

B. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah $\pm 30.569,56 \text{ Km}^2$ dengan pusat Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang. Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 Kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:KPTS.318 /VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam. Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (induk), Kabupaten Pelalawan (pemekaran) dan Kabupaten Rokan Hulu (pemekaran). Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi Pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 178 Desa/Kelurahan (71,2%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) desa tertinggal dan 11 (6,8%) desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa-desa berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu (Kampar dalam angka 2015).

Kabupaten Kampar terletak antara 01° 00' 40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27' 00" Lintang Selatan, dan 100° 28' 30" sampai dengan 101° 14' 30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :



ΔSebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak

ΔSebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Kuantan Singingi

Δ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

Δ Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-Sumatra Barat.

Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak disekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dengan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan has.

Di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat tiga buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

- Sungai Kampar Kanan yang panjangnya ± 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang melewati Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri;
- Sungai Kampar Kiri yang melewati Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir;

- Sungai Siak panjangnya \pm 90 km dan dengan kedalaman rata-rata 8-12 m, melintasi Kecamatan Tapung. Tiga sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, kegiatan budi daya perikanan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28 km² atau \pm 11,62% dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²). Dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km²(12,10%), diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.301,25 km²(11,53%) dan Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15 km² (10,36%). Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km²(0,68%) diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km²(0,71%) dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km²(0,99%).

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air hulu sungai yang terletak dipunggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berbeda di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri.

Letak geografis berpengaruh terhadap iklim dan musim. Pengaruh musim tersebut dapat menyebabkan pengaruh terhadap pola kegiatan usaha masyarakat berupa usaha di bidang pertanian. Pertanian yang baik akan maju dengan cepat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk/masyarakat. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam sektor perdagangan.

C. IKLIM

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan tofografi tempat tersebut.

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27°C - 33°C. Suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu Sebesar 21° C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Juni dengan temperatur 35° C. Kelembaban nisbi rata-rata 78-94 persen. Curahan hujan rata-rata 283 mm pertahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 380 mm.

Iklim tropis Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21° C. Temperatur maksimum terjadi pada bulan Juli dengan temperatur 35° C. Curah hujan yang terbanyak adalah sekitar Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar Kiri dan Gunung Sahilan. Kondisi iklim demikian cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan kemarau.

Kondisi lahan tanah relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat argonosol, gleihumus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebut luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humas. Semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut omborogen.

D. TOPOGRAFI

Topografi merupakan bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya) dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal (Ilmu Pengetahuan Sosial). Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan.

Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berbeda disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut kemiringan 0-40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis dan batuan terobosan yang terbesar

diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dan formasi geologi batuan metamorposhis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur laut kearah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, dan sebagian diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kampar telah mewarnai bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan gelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian Barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan bahan gambut.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian.

Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu jenis organosol dan gleihumus dengan bahan alluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, lading huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang sebesar, seluas 11.542 hektar (1,10%) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90%) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95%).

Pada sisi utara merupakan daratan gelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.

Bagian Barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam. Sedangkan bagian timur mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut.

Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26-100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan.

Kemudian Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluviasi, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. Grup Kubah Gambut

Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang panta tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10-20 meter di atas permukaan laut.

2. Grup Aluvial

Satuan lahan ini merupakan bentuk muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan alluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut.

3. Dataran Tuf Masam.

Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini di jumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40-250 meter di atas permukaan laut.

4. Dataran.

Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng <16% dan beda tinggi <50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang di jumpai, serta tutupan konkresi besi, lapisan plintit dan lain-lain.

5. Perbukitan.

Terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50-300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses peningkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh insturi batuan pultonik masam.

6. Pegunungan dan Plato

Terbentuk dari batuan sendiri halus sampai kasar, granit dan batuan volkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-Puncak berada pada ketinggian >1.000 m di atas permukaan laut.

E. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya dibidang administrasi Pemerintahan terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan penataan kelembagaan yang mampu menerapkan peran dan fungsinya dengan baik melayani masyarakat. Penataan ini meliputi peningkatan kemampuan profesionalisme aparat serta restrukturisasi organisasi secara sadar dan di arahkan pada terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Fungsi Aparatur Negara/Pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur Pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan

organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi dimasa yang akan datang.

1). Kelembagaan

Pada Tahun 2016, Kabupaten Kampar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, memiliki 31 OPD, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Lembaga Pengawasan, 21 (dua puluh satu) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dan 21 Kecamatan.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Pada Peraturan Daerah ini terdapat penambahan 1 (satu) Dinas, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran.

➤ Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pelayanan staf Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 Asisten dan 12 Kepala Bagian.

➤ Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

➤ Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten.

➤ **Dinas**

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, yaitu: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Perikanan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pemadam Kebakaran.

➤ **Badan**

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 6 (enam) Badan, yaitu: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

➤ **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Badan Layanan Umum Daerah yang ada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

2).Struktur Pemerintahan

Kabupaten Kampar memiliki 21 (dua puluh satu) Kecamatan, 242 Desa dan 8 Kelurahan. Camat sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Camat membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Adapun data Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dalam Kabupaten Kampar pada Tahun 2021 seperti tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Kelurahan dan Desa se Kabupaten Kampar

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	9	9
5	Kampar Kiri Tengah	-	11	11
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Kuok	-	9	9
8	Salo	-	6	6
9	Tapung	-	25	25

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
10	Tapung Hulu	-	14	14
11	Tapung Hilir	-	16	16
12	Bangkinang Kota	2	2	4
13	Bangkinang	2	7	9
14	Kampar	1	17	18
15	Kampa	-	9	9
16	Rumbio Jaya	-	7	7
17	Kampar Utara	-	8	8
18	Tambang	-	17	17
19	Siak Hulu	-	12	12
20	Perhentian Raja	-	5	5
21	Koto Kampar Hulu	-	6	6
JUMLAH TOTAL		8	242	250

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Kampar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP).

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kampar. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kampar. Secara selaras, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah yang berhasil diperoleh pada setiap akhir periode, pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu diinformasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

LKj memiliki dua tujuan utama, yaitu : (1). memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan (2). sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 MASALAH-MASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

1.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Proses pembangunan sangat bergantung dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai modal dalam menyokong keberhasilan pembangunan. Namun, dalam perjalanannya pembangunan daerah kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan yang telah dan tengah berlangsung ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kampar tersebar di berbagai bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

1.3.1.1 Pendidikan

Dinamika pendidikan yang begitu cepat mempengaruhi tindakan pelayanan yang harus dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi yang di emban oleh tenaga pendidik dan kependidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi standar isi, standar

kelulusan, standar kualifikasi akademik dan kompetensi, standar pengawas, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian pendidikan dan standar proses dikenal dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus disejalkan dengan perkembangan kemajuan pembangunan.

Oleh karena itu *leading sector* pendidikan secara bertahap merumuskan isu strategi berdasarkan delapan standar pendidikan nasional yang disinergikan dengan RJMD Kabupaten Kampar yaitu meliputi pengembangan kurikulum berbasis akhlak dan moral, akses dan pemerataan pendidikan yang berlandaskan akhlak dan moral, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen, pembiayaan pendidikan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu memotret permasalahan kunci (*key problem*) yang tepat sehingga memudahkan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dibidang pendidikan. Berikut merupakan permasalahan dibidang pendidikan:

a. **Wajib belajar sembilan tahun**

Rasio rombel per ruang kelas yang ada untuk tingkat jenjang pendidikan SD/MI masih terdapat kekurangan ruang kelas yang sangat signifikan yaitu 329 kelas. Jumlah kekurangan ruang kelas dengan kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa daya tampung siswa di setiap sekolah tidak mencukupi dan kalau dipaksakan untuk menerima siswa baru maka kepala sekolah melakukan langkah-langkah *double sit* atau menambah jumlah siswa per ruang kelas yaitu 34 orang atau bahkan 40 orang siswa per ruang kelas, sehingga melebihi ketentuan Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yaitu 28 siswa per ruang kelas. Disamping itu, kondisi ruang kelas yang rusak berat jenjang SD sebanyak 348 lokal dan rusak sedang 436 lokal dengan kondisi 30-50%.

Sedangkan untuk SMP/MTs juga masih terdapat kekurangan ruang kelas sebanyak 48 kelas. Kondisi ruang kelas yang rusak berat jenjang SMP/MTs sebanyak 58 kelas dan rusak sedang sebanyak 223 kelas.

b. **Kualitas Guru Rendah**

Salah satu faktor yang penting dibidang pendidikan yaitu ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi akademik strata satu (S1) PNS sebesar 78,56% atau sebanyak 3.736 orang, sedangkan untuk guru Non PNS sebesar 64,99% atau sebanyak 2.361 orang. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik diatas S1, sehingga berdampak pada mutu pendidikan di Kabupaten Kampar.

Selain rendahnya kualifikasi akademik guru, persentase guru bersertifikasi juga masih rendah. Tenaga pendidik yang berkualitas akan berdampak terhadap kinerja dan profesionalitas. Demi mencapai amanat Pemerintah Pusat di dalam Renstra Kementerian Pendidikan periode 2015-2019, yaitu guru dan tenaga kependidikan yang profesional ditargetkan hingga akhir periode sebesar 95 persen. Maka perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik yaitu dengan meningkatkan jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D4. Kualitas SDM pendidikan masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas di bidang pembelajaran. Aspek penting dari tenaga pendidikan bukan hanya sekedar kecukupan jumlah, yang dari tahun ke tahun sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Kualitas SDM pendidikan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

c. Sebaran Guru Belum Merata Terutama Di Pelosok

Pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu penyebab tidak meratanya mutu pendidikan di Kabupaten Kampar adalah penataan dan pemerataan guru yang tidak merata di semua Kecamatan (21 Kecamatan). Hal ini dapat dilihat dari data sebaran guru hasil analisis internal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dimana terdapat kelebihan guru di Kecamatan yang berdekatan dengan pusat perkotaan dan terdapat kekurangan guru di Kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan. Rasio guru terhadap murid mulai dari tingkat sekolah dasar dan menengah pertama seluruhnya telah memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan dengan rasio guru masing-masing sebesar 1:16 untuk sekolah dasar dan 1:12 untuk sekolah menengah pertama. Hanya saja, distribusi guru tidak merata di semua Kecamatan terutama untuk daerah pelosok (*remote area*). Peningkatan profesionalisme guru masih dibutuhkan dalam hal peningkatan kualifikasi tingkat pendidikan guru, peningkatan profesionalisme dan distribusi guru yang merata.

1.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan kesehatan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terealisasi baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, sejalan dengan dinamika kesehatan yang semakin kompleks. Untuk itu, penanganan masalah kesehatan melalui pembangunan kesehatan perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Memperhatikan hal tersebut di atas, serta melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal

tersebut tidak saja karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan kesehatan. Berikut merupakan permasalahan di bidang kesehatan:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masih Kurang Memadai

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Adapun fasilitas pelayanan dasar berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kampar telah tersedia 31 Puskesmas dengan pelayanan puskesmas 24 jam diseluruh UPTD puskesmas baik rawat inap maupun non rawat inap. Jumlah tersebut dinilai telah cukup, hanya saja secara kualitas perlu ditingkatkan.

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kampar telah tersedia 31 Puskesmas, 8 Puskesmas rawat inap dan 23 rawat jalan, 181 puskesmas pembantu dan 26 Puskesmas keliling serta 647 posyandu. Setiap Kecamatan telah memiliki puskesmas bahkan ada yang lebih dari 1 Puskesmas. Pada Kecamatan yang padat penduduk seperti Kecamatan Siak Hulu memiliki 3 Puskesmas, Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki 3 Puskesmas, Kecamatan Tapung memiliki 3 Puskesmas, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar Kiri Hulu dan Gunung Sahilan memiliki 2 Puskesmas dan Kecamatan lainnya memiliki masing-masing 1 Puskesmas. Semua fasilitas Kesehatan 31 Puskesmas sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan.

Era pandemic yang menyita konsentrasi puskesmas ke penanganan covid selama 2 tahun, dan adanya surat edaran penundaan penilaian reakreditasi dari komisi akreditasi Kementerian Kesehatan, sehingga dengan tidak adanya penilaian akreditasi membuat efek melemahnya tingkat kepatuhan petugas Kesehatan di Puskesmas dalam menerapkan standar dan instrument mutu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Upaya pemerataan pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan saat ini telah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Namun diberbagai tempat dan wilayah, beberapa sumber daya masih tertinggal dibanding wilayah lainnya. Ketertinggalan tersebut dapat dilihat dari minimnya jumlah petugas. Sementara diwilayah lainnya sarana dan prasarana serta sumber daya sangat melimpah. Dalam rangka mendukung visi kesehatan tentang peningkatan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, maka upaya pemerataan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menjadi sangat perlu diperhatikan. Menjadi tantangan ke depan

untuk dapat membuat seluruh wilayah terisi oleh sumber daya kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Tentunya diperlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dari para pengambil kebijakan.

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih Adanya Alih Fungsi Lahan Perkebunan

Alih fungsi lahan dari perkebunan karet menjadi perkebunan sawit (Kecamatan Kampar Kiri Tengah), kawasan hutan menjadi perkebunan sawit (Kecamatan Kampar Kiri Hilir) dan lahan perkebunan dikonversi menjadi pemukiman (Kecamatan Perhentian Raja) sebagai akibat perkembangan kota Pekanbaru. Alih fungsi lahan ini menyebabkan perubahan kepemilikan lahan (kepemilikan oleh orang luar) dan perubahan mata pencaharian masyarakat serta keterbatasan lahan kelola (usaha) masyarakat sehingga masyarakat hanya menjadi buruh saja atau pekerja perkebunan harian. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan juga dapat menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial antar masyarakat serta mengakibatkan konflik satwa dengan masyarakat (gajah).

b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang belum Memadai

Infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai dalam arti kondisi jalan masih tanah dan belum diaspal, kondisi jalan yang sudah rusak, kondisi jalan terputus ketika musim banjir dan belum ada jembatan atau jembatan sudah rusak. Akses jalan dari dan menuju lokasi produksi perkebunan masih kurang memadai, menimbulkan biaya yang tinggi dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menuju perkebunan. Akibatnya petani seringkali mengeluarkan tambahan biaya yang lebih besar. Permasalahan akses jalan juga dihadapi oleh salah satu perusahaan sawit di Koto Kampar, akses dari jalan raya ke pabrik jauh/topografi susah, sementara ada jalan dengan topografi bagus tapi tidak diberi izin oleh masyarakat tempatan, sehingga hasil produksi sulit untuk dibawa.

Keberadaan jalan yang memadai menjadi harapan dalam membantu operasional yang saat ini tinggi. Karena kurangnya akses baik transportasi dan komunikasi maka Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu menjadi terisolir. Selain itu akses menuju lokasi wisata yang minim mengakibatkan potensi wisata yang ada kurang berkembang. Selain permasalahan anggaran dalam membangun jalan dan jembatan, belum jelasnya kewenangan jalan produksi antara dinas atau desa juga menjadi penyebab. Terdapat juga kendala pembebasan lahan di hutan lindung dan kebun masyarakat terkait aturan dan pemilikan lahan.

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam Pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar antara lain :

1. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh yang belum tertangani;
2. Terbatasnya prasarana-sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
3. Belum optimalnya penanganan fasilitas, relokasi dan stimulasi rumah pasca bencana alam/sosial dan program Pemerintah;
4. Belum tertatanya kawasan ruang terbuka publik serta belum optimalnya penerangan jalan;
5. Belum maksimalnya regulasi di bidang perizinan perumahan, sertifikasi dan registrasi.

1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cukup Tingginya Potensi Bencana Alam

Potensi bencana longsor, banjir, puting beliung dan kekeringan cukup tinggi. Empat belas Kecamatan berpotensi kebakaran hutan. Lokasi terjadinya banjir berada di Bangkinang Kota, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Kecamatan Kuok. Sedangkan longsor terjadi di Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok. Cuaca ekstrim (panas dan hujan); panas memicu terjadinya bencana kebakaran, hujan menyebabkan banjir.

Semua Kecamatan yang dilewati Sungai Kampar, kecuali Kecamatan Tapung Hulu merupakan daerah rawan banjir. Banjir kerap menimbulkan longsor di sepanjang pinggiran sungai. Banjir tidak hanya menimpa permukiman masyarakat, namun juga menimpa lahan pertanian yang sering menyebabkan rusaknya tanaman pertanian dan gagal panen. Dibutuhkan pembangunan turap di sekitar permukiman sepanjang Sungai Kampar untuk mencegah banjir di permukiman warga.

Banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan mulai berkurangnya tutupan lahan di hulu Sungai Kampar. Wilayah hulu Sungai Kampar sebagian terdapat di Kabupaten Kampar dan sebagian di Sumatera Barat, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama

lintas Provinsi untuk upaya restorasi wilayah hulu Sungai Kampar. Infrastruktur pencegahan banjir juga belum memadai.

Keberadaan PLTA cukup membantu mengurangi banjir, namun tidak sepenuhnya dapat mencegah banjir ketika debit air sangat banyak dan sudah tidak tertampung lagi oleh bendungan PLTA.

1.3.1.6 Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2017-2022, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional;
2. Kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2017-2022;
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2017-2022.

Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negative berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial kedalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

1.3.1.7 Tenaga Kerja

a. Kurang Tersedianya Tenaga Kerja Yang Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia menjadi penunjang utama dalam menjalankan berbagai jenis perusahaan. Rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai atau tenaga kerja menjadi penyebab lemahnya geliat sektor industri dan bidang usaha lain.

Salah satu permasalahan tenaga kerja yang mengemuka adalah kurang tersedianya tenaga kerja lokal yang berkualitas dan sesuai standar perusahaan. Dari data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, persentase tenaga kerja lokal pada perusahaan-perusahaan besar yaitu sebesar 37%. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar mensyaratkan 60 persen tenaga kerja lokal pada investasi berada di Kabupaten Kampar. Persoalan yang dihadapi perusahaan adalah ketersediaan SDM yang berkualitas dan sesuai standar kebutuhan perusahaan untuk mengisi posisi-posisi di perusahaan. Banyak Balai Latihan Kerja (BLK) terdapat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, namun kualitas SDM keluaran dari BLK masih belum memadai. Pemerintah Daerah diharapkan proaktif dalam mengatasi persoalan kapasitas SDM untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan/pabrik, untuk penyediaan dan peningkatan kualitas SDM (BLK/SMK).

Sektor penyedia lapangan kerja utama masih sektor Pertanian dengan persentase sebesar 46,30% dari total Angkatan kerja yang bekerja (Tahun 2013). Sektor penyedia lapangan kerja terbesar kedua dan ketiga sektor jasa yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (20,60%) dan jasa-jasa (15,20%). Ke depan, seiring dengan peningkatan angkata kerja dan semakin terbatasnya kemampuan sektor pertanian menyerap limpahan tenaga kerja maka upaya pengembangan sektor industri perlu dilakukan yang didukung dengan pelatihan peningkatan skill angkatan kerja.

Selain itu, perlu sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Peraturan Daerah Ketenagakerjaan terutama menyangkut definisi tenaga kerja lokal. Terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang definisi tenaga kerja lokal oleh masyarakat. Perbedaan penafsiran tersebut yaitu tenaga kerja lokal dalam peraturan, apakah yang memiliki KTP Kabupaten Kampar atau masyarakat tempatan di lokasi perusahaan.

1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih

adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut diatas.

Berikut merupakan permasalahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relative rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
2. Angka harapan hidup perempuan relative rendah dibandingkan daerah lain;
3. Rata-rata lama sekolah relative rendah dibandingkan daerah lain;
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relative rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain;
5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislative relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan;
7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
8. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
9. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran;
10. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
11. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana;
12. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
13. Munculnya berbagai tindak kekerasan dimedia online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
14. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;

15. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
16. Tingginya kematian pada bayi dan balita;
17. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita;
18. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
19. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak;
20. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
21. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
22. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
23. Perhatian dan partisipasi dari kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

1.3.1.9 Lingkungan Hidup

a. Terjadinya degradasi lingkungan

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

b. Peningkatan beban pencemaran

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

c. Pengelolaan persampahan

Meningkatnya timbulan sampah di pemukiman masyarakat, karena kebiasaan masyarakat membuang sampah yang salah sementara teknologi pengolahan sampah yang digunakan masih minim.

1.3.1.10 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Pembangunan kependudukan di tujuikan untuk menciptakan keadaan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Penduduk memegang peranan penting dalam upaya mempercepat proses pengembangan nasional dan daerah, karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan yang seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- a. Alat cetak KTP-El masih kurang karena yang ada pada saat ini baru 4 (empat) unit dan 1 (satu) unit dalam keadaan rusak. Diharapkan alat cetak KTP-El untuk Kabupaten Kampar sebanyak 5 (lima) unit karena kemampuan alat tersebut untuk mencetak sangat terbatas dan sangat sensitif apabila mencetak diatas kemampuannya alat tersebut cepat rusak;
- b. pengadaan blanko KTP-El masih dari pusat melalui Dirjen Adminduk Kemendagri sehingga tidak bisa diminta sesuai dengan yang dibutuhkan apabila blanko KTP-El yang diberikan pusat habis makan pelayanan terhadap masyarakat terpaksa terhenti/tersendat sambil menunggu dan blanko harus dijemput ke pusat.

1.3.1.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditunjukkan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain disetiap perdesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu, pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Faktor-faktor penghambat dari pelayanan DPMD Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perekonomian

Masalah perekonomian juga menjadi salah satu masalah yang sangat penting dan merupakan isu global yang menjadi perhatian semua kalangan. Terlebih lagi masalah ekonomi mikro yang tumbuh disebagian besar masyarakat pedesaan. Dampak krisis global memberi pekerjaan rumah yang tidak ringan kepada pihak Pemerintah. Masalah/isu yang berkembang saat ini tentang pembangunan perekonomian pedesaan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan ekonomi yang belum berfungsi secara optimal seperti Koperasi Unit Desa, kelompok-kelompok usaha dan lain-lain. Bahkan di daerah/desa tertentu lembaga tersebut nyaris tidak ada;
2. Keterbatasan modal usaha karena kesulitan mengakses dunia perbankan;

3. Sempitnya ruang pemasaran, disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang mengakses daerah tersebut;
4. Masih rendahnya kualitas produk, sehingga tidak bisa berkompetisi secara maksimal;
5. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan wirausaha dan penggunaan teknologi tepat guna.

b. Pemerintahan Desa

Kondisi Pemerintahan Desa saat ini memerlukan penanganan dan pembinaan secara efektif dan terpadu. Isu yang berkembang tentang manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa, seperti pemahaman tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
2. Belum tergalinya sumber daya desa secara optimal yang disebabkan oleh masih lemahnya produk hukum desa, seperti APBDes, Perdes dan sejenisnya;
3. Belum optimalnya kemandirian desa dalam menjalankan roda Pemerintahan dan belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
4. Masih rendahnya sumber daya tenaga pengelola administrasi desa, hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan Kepala Desa Sekretaris Desa yang masih mayoritas lulusan SLTA bahkan SLTP.

1.3.1.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk dan program Keluarga Berencana (KB), hingga saat ini belum menampilkan hubungan timbal balik sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang cenderung meningkat pada angka rata-rata 11% pertahun dan Pasangan Usia Subur (PUS) pun cenderung bertambah. Kondisi ini memberikan sinyal yang kuat dan ancaman dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Hal tersebut sangat disadari, bahwa Kabupaten Kampar sebagai barometer Provinsi, dengan pertumbuhan penduduk yang cenderung bertambah, perlu diantisipasi melalui peningkatan intensitas penyuluhan dan pelayanan KB pada masyarakat luas, terutama masyarakat miskin, terisolir dan perbatasan, sehingga Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi dambaan masyarakat yang mengakar kesuatu realita kehidupan keluarga kecil berkualitas, sejahtera yang dapat menopang 5 (lima) Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar.

Permasalahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya :

1. Masih tingginya *Unmeet Need* di Kabupaten Kampar;
2. Masih banyaknya perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun yang disebabkan oleh tekanan ekonomi keluarga;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB;
4. Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB;
5. Belum adanya buku *Grand Design* Kependudukan di Kabupaten Kampar;
6. Masih kurangnya peran serta kelompok masyarakat (Toga dan Toma) dan Kader (Kader KB dan Kader PKK);
7. Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja baik dan TNI;
8. Belum semua keluarga menjadi anggota kelompok kegiatan dan mengikuti dan masih kurangnya kerjasama dengan lintas sector;
9. Belum semua PUS yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB ikut ber-KB;
10. Belum semua persentase PUS yang aktif menjadi anggota kelompok kegiatan BKR ikut ber-KB;
11. Belum semua persentase PUS yang aktif menjadi anggota kelompok keluarga BKL ikut ber-KB;
12. Belum semua Kecamatan memiliki fasilitas PIK Jalur masyarakat dan kurangnya kerjasama dengan *stake holder* seperti DIKPORA, Dinas Kesehatan, OPD terkait dan mitra kerja lainnya;
13. Masih kurangnya fasilitas anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS untuk ber KB;
14. Belum terbinanya hubungan dan kerjasama dengan pihak *stakeholder* terkait seperti di Dinas Kesehatan;
15. Belum adanya PIK R/M mandiri dan tersedianya donator untuk penyelenggara kegiatan PIK R/M disetiap sekolah;
16. Masih ditemukan Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.

1.3.1.13 Perhubungan

a. Kurangnya Manajemen Transportasi

Manajemen lalu lintas (transportasi) adalah serangkaian :

- 1) Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, operasional dan pengawasan;
- 2) Koordinasi antara infrastruktur, lalu lintas dan pengaturan;

- 3) Teknik manajemen lalu lintas;
- 4) Impact group/stake holder.

Yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, disamping tujuan tersebut juga dimaksudkan agar efisien dan selamat atau yang lazim disebut dengan *Efficiency and Safety, environment*, Konservasi Energi, *Equity*, Biaya Pemakai (*User Cost*).

b. Kurangnya Manajemen Aparatur

Instansi Perhubungan adalah instansi teknis, maka dibutuhkan penyeleksian terhadap calon aparatur yang akan bekerja di instansi teknis ini. Karena tujuan utama dari transportasi itu adalah keselamatan (*safety*), dan ukuran dari keselamatan adalah cepat, selamat dan aman. Dengan beberapa kondisi pada waktu di jalan yang antara lain : was-was, nyaman, terlindungi, resiko/kecelakaan, bebas dan pejalan kaki atau sama dengan istilah *motorized trip* atau pejalan kaki.

1.3.1.14 Komunikasi dan Informatika

a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang statistic dan informasi publik.
2. Masih kurangnya komitmen pimpinan OPD terhadap integrasi data pertukaran data dan keterisian data.
3. Sistim informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Belum berjalannya fungsi kelompok informasi masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
5. Belum tersedianya data yang akurat dan muktahir untuk mendukung bidang statistic.
6. Penggunaan data rujukan bagi OPD yang tidak seragam.
7. Sangat minimnya anggaran kemitraan dalam rangka penyebaran informasi.

b. Penerapan *e-government* Masih Rendah

E-government dapat dimaknai sebagai optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan Pemerintahan. *E-government* adalah salah satu dari empat pilar untuk membangun *smart city* (tiga pilar lainnya adalah pendidikan yang berkualitas, masyarakat pembelajar, dan proses pengambilan keputusan publik yang cerdas). Diantara hal-hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan *e-government* ini adalah adanya regulasi daerah tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jumlah unit kerja (perangkat daerah, UPTD, kelurahan, kecamatan, Puskesmas, BUMD, sekolah) yang terkoneksi internet, pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk perangkat daerah, pengembangan SIM yang

terintegrasi antar perangkat daerah, pemberian pelayanan publik berbasis internet, dan penyediaan ruang publik yang berfasilitas *wi-fi*.

Untuk saat ini, penerapan *e-government* di Kabupaten Kampar masih tergolong rendah. Di tengah era komunikasi dan informasi yang demikian pesat berkembang ini, ketertinggalan ini perlu dikejar oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga dapat semakin baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya sekaligus menangkap peluang-peluang yang ada seperti investasi swasta.

1.3.1.15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Perdagangan, Koperasi dan UMK masih menghadapi banyak kendala. Kelembagaan Usaha Koperasi dan UMK merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Koperasi dan UMK. Perlu digarisbawahi bahwa lebih dari 6.462 usaha yang ada atau lebih dari 90% pelaku usaha adalah usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang, karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis, disamping itu pula badan usaha perorangan kebanyakan usaha dagang dikelola secara tertutup dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai, jumlah usaha sektor riil berkembang lambat, kebanyakan pelaku usaha baru lebih memilih usaha dagang/ritel dan usaha dari pasar ke pasar. Upaya pemberdayaan UMK ke depan makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMK demikian banyak dan luas, terlebih lagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan serta kultur masyarakat yang beraneka ragam di lapangan.

Permasalahan di Bidang Perdagangan Koperasi dan UKM diantaranya :

1. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal dan profesional;
2. Masih rendahnya persentase koperasi yang aktif dibandingkan jumlah koperasi secara keseluruhan dan belum semuanya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana jati diri koperasi;
3. Pola kemitraan/kerja sama antara koperasi, usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar belum optimal, baik dibidang permodalan maupun pemasaran;
4. Masih lemahnya daya saing produk ekspor non migas;
5. Masih terbatasnya promosi produk unggulan daerah;
6. Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan seperti borax, formalin, rodamin B dan Metanil yellow relative masih tinggi;
7. Dari jumlah 519 unit koperasi sekitar 42% termasuk koperasi tidak aktif;

8. Rendahnya sistem informasi dan usaha/informasi pasar;
9. Lemahnya koordinasi/peran instansi terkait dalam meningkatkan pengembangan usaha koperasi.

1.3.1.16 Penanaman Modal

Identifikasi masalah dapat diperoleh dari hasil berbagai kumpulan data melalui wawancara langsung, jawaban kuesioner baik yang dilakukan langsung di DPMPTSP maupun instansi pendamping lainnya, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan maupun masalah terkait dengan investasi dalam peningkatan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Secara umum bahwa belum berkembangnya sektor hilir dari perkebunan kelapa sawit dan masih sangat tergantung pada ekspor CPO, sehingga perlu dipacu sektor hilirnya agar peluang investasi untuk pengembangan usaha sector hilir dapat berkembang;
2. Harga jual komoditi karet masih kurang stabil, sehingga mengakibatkan kondisi sektor perkebunan (komoditi karet) masih rentan;
3. Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak yang terkait yang akan dijadikan acuan dalam pemberian rekomendasi perizinan;
4. Sarana dan prasarana pendukung (gedung, meubelair dan perangkat computer) yang relative terbatas dan belum representatif;
5. Lemahnya pengelolaan database mengenai perizinan yang diterbitkan pada waktu-waktu yang lalu, sehingga apabila muncul permasalahan dikemudian hari akan sulit untuk diidentifikasi;
6. Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan;
7. Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan continue;
8. Semangat kerja aparatur/petugas yang fluktuatif (kurang stabil).

1.3.1.17 Kepemudaan dan Olah Raga

Sarana dan Prasarana Olahraga Kurang Memadai

Generasi muda menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemajuan daerah, terutama partisipasi mereka dibidang olahraga. Keberhasilan pembangunan olahraga sangat dipengaruhi oleh adanya pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Melalui pembinaan dan penyediaan sarana prasarana tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya prestasi olahraga di daerah.

Sarana dan prasarana pemuda dan olahraga masih perlu mendapat perhatian dan perlu penambahan pembangunan sarana prasarana di setiap Kecamatan.

1.3.1.18 Perikanan

Permasalahan didalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Kampar antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga sulit mengadopsi teknologi sesuai perkembangan sehingga belum optimalnya penerapan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat;
- b. Kesenjangan antara jumlah nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh serta sarana dan prasarana penunjang penyuluhan;
- c. Kemampuan modal yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan sangat kecil sehingga sangat sulit untuk memasarkan dan mengembangkan usaha;
- d. Kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan akibat belum adanya informasi paket investasi menguntungkan;
- e. Masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal akses permodalan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam rangka pengembangan usaha;
- f. Masih adanya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan terlarang seperti racun dan bom;
- g. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
- h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan maupun sarana pendukung lainnya seperti TPI/PPI, pabrik es dan prasarana saluran tambak;
- i. Masih rendahnya penanganan pasca panen;
- j. Terbatasnya infrastruktur dasar, seperti kelistrikan, modal transportasi dan prasarana jalan;
- k. Organisasi pembudidaya dan nelayan belum berfungsi secara optimal;
- l. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
- m. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan;
- n. Tata letak (*lay out*) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
- o. Masih tingginya ancaman penyakit ikan.

1.3.1.19 Pariwisata

Kabupaten Kampar memiliki potensi pariwisata yang besar namun belum dikembangkan. Potensi tersebut diantaranya berupa destinasi wisata alam, wisata sejarah, budaya, wisata religious, wisata buatan, wisata minat khusus dan wisata keluarga. Penduduk Kota Pekanbaru dapat menjadi pasar yang besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar. Setiap akhir minggu banyak warga dari Kabupaten Kampar yang berwisata ke Pekanbaru, kondisi tersebut terharusnya dapat dibalik dengan menjadikan Kabupaten Kampar sebagai destinasi wisata bagi masyarakat kota Pekanbaru. Selama ini cukup banyak warga Pekanbaru yang berwisata menuju Sumatera Barat dan hanya sebatas melewati Kabupaten Kampar.

Beberapa permasalahan pengembangan dibidang kebudayaan dan pariwisata yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah;
2. Minimnya literature dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah;
3. Rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah;
4. Belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya;
5. Belum optimalnya pengembangan objek wisata;
6. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap usaha kepariwisataan;
7. Rendahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan objek wisata;
8. Belum optimalnya penggunaan media promosi wisata yang dilakukan;
9. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur dibidang pariwisata.

1.3.1.20 Pertanian

Dengan luas wilayah Kabupaten Kampar 1.128.928 Ha, terdapat potensi untuk bidang tanaman pangan dan hortikultura seluas 183.286 Ha (16,24%) yang terdiri dari lahan sawah seluas 4.807 Ha (0,43%) dan lahan kering seluas 178.479 Ha (15,81%). Permasalahan yang ada dalam sektor pertanian adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya alam

Kondisi lahan pertanian yang cukup luas belum termanfaatkan secara maksimal disebabkan berbagai hal diantaranya adalah:

1. Kondisi geografis lahan pertanian tersebut yang umumnya bermasalah dengan ketersediaan air yang kurang maksimal untuk areal persawahan dan pengembangan tanaman hortikultura;

2. Masih tingginya keasaman dari lahan pertanian sehingga menghambat pertumbuhan komoditas pertanian yang sedang dibudidayakan;
3. Kondisi topografi kemiringan lahan pertanian yang beragam sehingga perlu penanganan yang beragam dan lebih spesifik terhadap masalah yang terjadi di lokasi lahan pertanian tersebut supaya tidak mengalami puso akibat terendam air pada bulan-bulan bercurah hujan tinggi.

b. Sumberdaya manusia

1. Menurunnya minat kaum muda untuk mengelola pertanian secara berkesinambungan sehingga perlu digalakkan lagi semangat menanam pada generasi muda;
2. Masih banyak kelompok tani yang belum dikukuhkan sehingga menghambat proses transfer bantuan kegiatan atau pengalokasian kegiatan yang berkaitan dengan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

c. Sarana dan prasarana pertanian

Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang masih berfungsi semakin berkurang jumlahnya, yang disebabkan karena faktor usia dan kurangnya perawatan dari kelompok tani penanggung jawab alsintan tersebut.

1.3.1.21 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial dan politik dalam suatu Negara dan Daerah. Masalah pangan tidak semata-mata pada kegiatan produksi tetapi berkaitan dengan 5 (lima) aspek penting yaitu : 1). Konsumsi, 2). Ketersediaan, 3). Cadangan, 4). Keamanan dan 5). Kerawanan Pangan/kemiskinan. Kelima aspek tersebut secara rinci di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan Pangan.

Laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan produksi, mengakibatkan terjadi kesenjangan yang besar antara permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat hanya dapat dipenuhi oleh Pemerintah melalui kegiatan impor dari daerah lain. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan ketergantungan penduduk terhadap produk-produk dari daerah lain semakin meningkat dan akan mengganggu neraca perdagangan daerah yang berakibat pada menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran.

b. Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan.

Salah satu permasalahan yang terdapat pada jalur distribusi komoditas pangan adalah tingginya biaya transportasi produk dari daerah asal ke daerah tujuannya. Selain kondisi jalan yang kurang baik, banyaknya pungutan dalam bentuk retribusi yang resmi maupun tidak resmi di sepanjang jalur distribusi utama mengakibatkan pihak distributor membebankan biaya yang mereka derita kepada konsumen akhir melalui peningkatan harga produknya.

Bagi pemerintah daerah keberadaan berbagai macam retribusi merupakan sebuah dilema yang harus dihadapi. Disatu sisi retribusi merupakan sumber pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat bermanfaat bagi proses pembangunan. Di sisi lain retribusi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun karena menyebabkan tingginya harga produk (terutama produk pangan) yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan bagian penting dari perencanaan daerah karena memperhatikan hal-hal yang berdampak luas dan jangka panjang. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, juga terhadap potensi yang dimiliki, dan peluang daerah di masa yang akan datang, maka isu strategis Kabupaten Kampar yang patut menjadi bagian yang diakomodir RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 seperti diuraikan sebagai berikut :

1.3.2.1 Membangun SDM yang handal dan relevan dengan kebutuhan daerah

Membangun masa depan sebuah daerah salah satunya adalah dengan membangun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjamin peningkatan taraf pendidikan baik yang bersifat formal maupun informal. Kemampuan dalam melanjutkan pendidikan juga harus disertai dengan kompetensi pendidikan yang dapat mengakomodir kebutuhan daerah. Kabupaten Kampar masih memiliki permasalahan diantaranya : rendahnya angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Selain itu upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi bagian yang penting untuk direncanakan.

1.3.2.2 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

Kondisi lingkungan yang baik dicerminkan dengan kondisi kesehatan masyarakat yang juga dapat mendorong produktifitas masyarakat. Selain itu lingkungan yang baik juga ditunjang dengan perilaku masyarakat yang proaktif serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan percepatan perbaikan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan strategi pembangunan kesehatan, sasaran serta kebijaksanaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, merata dan terintegrasi. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian ketika berbagai permasalahan kesehatan masih dialami Kabupaten Kampar. Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan, indikator-indikator kesehatan yang masih rendah, menjadi hal yang patut menjadi perhatian dan penyelesaian dalam sebuah perencanaan.

1.3.2.3 Mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sektor pariwisata merupakan salah sektor yang memiliki *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Kampar memiliki banyak potensi wisata mulai dari wisata alam meliputi objek sungai, taman nasional, air terjun dan lainnya; Wisata Budaya meliputi objek situs dan candi; Wisata Kuliner dengan menyediakan makanan khas yang perlahan menjadi incaran warga Pekanbaru; dan Wisata Kreatif dengan memadukan sentra perikanan berikut produk-produk olahannya sehingga menjadi destinasi wisata baru.

Selama ini Kabupaten Kampar menjadi daerah perlintasan yang hanya dilalui para wisatawan yang menuju Sumatera Barat. Mobilisasi wisatawan yang hanya melalui Kabupaten Kampar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pendapatan baru melalui sektor pariwisata. Mengingat juga posisi strategis Kabupaten Kampar yang berada dalam kawasan regional Pekan Sikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). Pengembangan destinasi wisata dapat menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan bukan merupakan sebuah perlintasan. Dengan menjadi daerah tujuan tentu perputaran uang di daerah dari pendatang akan meningkat. Selain itu jumlah kunjungan akan mendorong tempat penginapan dan hotel berkembang.

1.3.2.4 Mengoptimalkan potensi sektor perikanan

Kabupaten Kampar saat ini telah menjadi pusat perikanan air tawar di Provinsi Riau. Dengan luasan lahan perikanan yang cukup besar, pengembangan perikanan darat masih

menjadi perhatian dalam rencana pembangunan ke depan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi lahan perikanan dengan mendorong peningkatan produksi yang disertai pembinaan benih, pakan dan pemasaran. Selain itu sektor perikanan air tawar masih dapat dikembangkan dengan mendorong nilai tambah melalui produksi pengolahan dan integrasi dengan pariwisata.

1.3.2.5 Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura lokal unggulan, perkebunan dan peternakan

Sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan masih merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan mengingat luasan kawasan perkebunan baik karet maupun sawit yang begitu besar diantara daerah lain di Provinsi Riau. Komoditas lain meliputi kelapa, gambir, kakao, kopi dan pinang, serta jeruk kuok juga masih menjadi potensi dalam pengembangan perkebunan rakyat. Ketidakjelasan status lahan perkebunan masih menjadi kendala yang masih terjadi, di sisi lain pemanfaatan lahan untuk aktifitas perkebunan rakyat selain berkontribusi pada peningkatan produksi perkebunan, juga dapat menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Perhatian terhadap ketersediaan lahan perkebunan rakyat, pendampingan dan pembinaan menjadi hal yang penting dalam perencanaan ke depan. Integrasi lahan-lahan perkebunan perusahaan dengan peternakan sapi juga menjadi peluang yang dikembangkan.

1.3.2.6 Memberdayakan masyarakat dan desa

Semangat pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dengan mengimplementasikan perencanaan dan pembangunan yang dapat dilakukan pada basis wilayah administrasi dengan lingkup yang lebih kecil sehingga implementasi dan pengawasan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Mengoptimalkan dana desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan dengan tepat, sehingga kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan dapat sinergi dengan RPJMD Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki 242 Desa dan 8 Kelurahan yang tersebar di 21 Kecamatan, sehingga mendorong kemandirian desa harus disertai juga peningkatan kapasitas Kecamatan.

Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dan Desa adalah melalui kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Melalui pengelolaan BUMDES secara baik dan tepat, maka akan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Keberadaan

dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan BUMDES ini melalui penyertaan modal.

Hanya saja, sebagaimana banyak daerah lain di Indonesia, pengembangan BUMDES masih menghadapi banyak kendala. Data menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 16 BUMDES di Kabupaten Kampar yang tergolong aktif dari 242 desa yang ada. Diantara kendala-kendala tersebut adalah pengelola BUMDES yang belum profesional dan pemilihan bidang usaha yang belum mempertimbangkan karakteristik sumber daya lokal yang ada di desa.

1.3.2.7. Mengembangkan UMKM menjadi lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro. Koperasi mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha mikro, kecil dan menengah dari lembaga keuangan/permodalan konvensional. Bagian penting lain adalah upaya mendorong kemauan, gairah dan iklim usaha ditengah masyarakat, sehingga sebelumnya dibutuhkan berbagai penguatan kapasitas dan kemudahan harus dihadirkan.

1.3.2.8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah

Keberadaan dan kelestarian *catchment area* menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang cukup penting di Kabupaten Kampar yang memiliki keinginan besar dalam memajukan pembangunan dan mengembangkan wilayah. Pembukaan lahan baik untuk pemukiman dan perkebunan menyebabkan penurunan daerah tangkapan air baik dari segi kuantitas dan kualitas. Penyelamatan Daerah Aliran Sungai di sepanjang Sungai Kampar menjadi penting karena keberadaannya bukan hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat namun juga menjadi ikon Kabupaten. Kondisi lingkungan lain yang patut menjadi perhatian adalah persoalan terkait kesehatan lingkungan perumahan, yang memicu munculnya kawasan pemukiman kumuh. Selain permasalahan limbah rumah tangga, pembangunan sistem drainase juga belum diupayakan secara optimal.

1.3.2.9. Memantapkan infrastruktur daerah guna menunjang konektivitas antar wilayah

Masih terdapatnya Kecamatan yang terisolir menjadi tantangan dalam pekerjaan umum di Kabupaten Kampar. Peningkatan sarana jalan dan jembatan dalam mendukung mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan baik pendidikan, kesehatan maupun aktifitas ekonomi perlu dilakukan dalam kerangka membuka keterisoliran dan mendorong pertumbuhan. Menjamin keterhubungan wilayah penyangga terhadap wilayah pusat pelayanan, menjadi perhatian dalam penataan struktur ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah. Isu ini juga menjadi penting salah satunya dalam hal pengembangan pemukiman yang terintegrasi. Lebih lanjut pengaturan pola pemanfaatan ruangantara lain dapat menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan yang tidak terencana yang selama ini seringkali menjadi sumber konflik lahan dan konflik sosial.

Pemantapan infrastruktur daerah ini juga perlu dilakukan secara sinergis dengan daerah-daerah tetangga lainnya. Untuk itu, perlu dijalin kerjasama yang saling menguntungkan khususnya dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Inisiatif ini telah terwadahi dalam forum kerjasama antar daerah Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan (PEKAN SIKAWAN) yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, menunjang keserasian pembangunan, penyelesaian konflik daerah perbatasan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergisitas dan saling menguntungkan. Tujuan tersebut kemudian dikerucutkan pada rencana program kerjasama diantaranya tata batas administrasi wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perhubungan/transportasi, dan lingkungan hidup.

Keberadaan forum ini tentunya perlu dioptimalkan lebih lanjut sehingga isu mengenai pemantapan infrastruktur daerah dan konektivitas antar wilayah dapat diselesaikan secara lebih efisien dan terpadu melalui kerjasama antar daerah. Pembelajaran dari forum-forum kerjasama antar daerah lainnya di Indonesia dapat digunakan sebagai referensi sehingga Pekan Sikawan dapat menjadi forum yang benar-benar memberi kontribusi nyata untuk kepentingan bersama seluruh daerah.

1.3.2.10. Mengembangkan kehidupan sosial yang sehat, harmonis, agamis, dan berbudaya

Keberhasilan pembangunan seringkali meninggalkan permasalahan sosial yang kerap timbul di masyarakat. Hal tersebut tidak hanya muncul dari dalam wilayah Kabupaten saja namun besar juga datang dari pengaruh-pengaruh perkembangan di wilayah luar Kabupaten. Seperti berkembangnya penyakit masyarakat yang mulai marak terjadi. Hal ini menjadi sangat

krusial ketika generasi muda yang menjadi dampak akan permasalahan tersebut. Pendekatan penguatan pendidikan moral dan budaya lokal dapat menjadi penangkal perkembangan budaya negatif tersebut, disamping dapat memperkuat karakter daerah. Selain itu pendekatan pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dapat menyelesaikan permasalahan lain dari permasalahan sosial seperti kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial.

1.3.2.11. Mengembangkan sektor industri guna peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi ekonomi daerah

Melalui pengembangan sektor industri, diharapkan bahwa hasil-hasil sumber daya alam ini dapat memberikan nilai tambah atau manfaat yang jauh lebih besar lagi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Secara bertahap dan dalam jangka panjang, ini akan mengubah struktur perekonomian dari yang awalnya bertumpu pada sektor primer menjadi berbasis pada sektor sekunder. Ekonomi yang digerakkan oleh sektor sekunder adalah ekonomi yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan ekonomi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dalam rentang tahun 2011 - 2016 dapat menjadi contoh dari instabilitas ini, dari 4,11% pada tahun 2011 naik menjadi 6,31% pada tahun 2013 untuk kemudian anjlok drastis menjadi 1,09% pada tahun 2015. Diharapkan, melalui pengembangan sektor industri, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih stabil lagi.

Tetap perlu diperhatikan bahwa tenaga kerja yang nantinya akan terserap oleh sektor industri yang hendak dikembangkan ini adalah berasal dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, prinsip bahwa industri yang akan dikembangkan adalah industri yang inklusif secara sosial (*social inclusiveness*) haruslah tetap dijaga, salah satunya dengan menyesuaikan antara jenis industri yang akan dikembangkan dengan ketersediaan sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusianya.

Perumusan isu strategis dan masalah mendesak di atas didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi pencapaian target sesuai visi dan misi dalam RPJMD 2017-2022 yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional melalui RPJMN dan RKP Tahun 2017. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan identifikasi terhadap prioritas pembangunan dan persoalan yang mendesak pada kebijakan nasional, provinsi dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2017. Identifikasi terhadap isu strategis nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah (Provinsi dan Kabupaten), sehingga

penentuan arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Berdasarkan kondisi pencapaian target visi - misi RPJMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam LKj ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Kampar, Kelembagaan/struktur Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, maksud dan tujuan penyusunan LKj serta Masalah-Masalah dan Isu-Isu Strategis Pembangunan

Bab 2 – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara singkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2021.

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja serta pengukuran kinerja yang didukung dengan data-data pendukung pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan capaian RPJMD serta Analisis Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2021.

Bab 4 – Penutup.

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2021 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran-Lampiran.

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**BAB
II****PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pada penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Teknis Reviu atas Laporan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. VISI – MISI KABUPATEN KAMPAR

Visi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Akhir periode perencanaan yang dimaksudkan oleh RPJMD ini adalah tahun 2022. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil dari pemilihan kepada daerah yang telah diselenggarakan dengan lancar pada tahun 2017.

Rumusan visi berguna untuk memberikan panduan sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Agar dapat mencapai maksud tersebut, maka rumusan visi haruslah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, termasuk juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berdasarkan pada kebutuhan daerah, potensi, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, maka visi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

” Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mengandung empat kata-kata kunci yang masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Wilayah industri yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sektor industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk didalam sektor industri ini adalah industri pariwisata.

Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kehendak untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri adalah kehendak untuk tidak hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam saja melainkan juga peningkatan nilai tambah barang. Untuk saat ini, karakteristik industri pengolahan di Kabupaten Kampar didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman dengan kategori pengolahan kelapa sawit. Tentunya pengembangan sektor industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Apalagi terdapat sektor pariwisata sebagai bagian dari pengembangan industri ini yang mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang asri.

2. Wilayah pertanian yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktivitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat taraf ekonomi sebagian besar masyarakat.

Selain prioritas terhadap subsektor perkebunan, memajukan pertanian juga dilakukan dengan memberi perhatian tersendiri pada subsektor tanaman pangan. Meskipun kontribusinya jauh lebih kecil dibanding subsektor perkebunan tahunan, namun pertumbuhannya menunjukkan tren positif. Prioritas pada subsektor ini, selain menunjang ketahanan pangan daerah, juga berkontribusi terhadap prioritas nasional produksi pajale (padi, jagung, kedelai).

3. Masyarakat yang religius, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri pribadi masing-masing, dan teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk etos kerja yang tinggi, disiplin dan jujur sebagaimana agama telah mengajarkan. Dalam hubungan sesama manusia, baik antar suku, ras, agama, maupun antar golongan, terjalin relasi yang rukun dan saling menghormati. Demikian pula halnya dengan relasi terhadap alam, nilai-nilai ramah lingkungan terinternalisasi sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang merusak alam.
4. Masyarakat yang beradat dan berbudaya, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah. Adat dan budaya yang mengandung kearifan tradisional ini menjadi tata nilai yang mengatur masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga warisan leluhur yang agung ini dapat senantiasa dipraktekkan dan dilestarikan. Masyarakat hukum adat pada berbagai kenegerian diakui keberadaannya berikut hak ulayatnya sehingga dapat menjadi kelembagaan lokal yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam setempat. Produk-produk kebudayaan warisan masa silam seperti keberadaan Candi Muara Takus senantiasa dilestarikan sehingga menjadi bagian dari kekayaan sejarah

sekaligus pembelajaran untuk generasi saat ini. Dengan kehidupan adat dan budaya yang kental, produk-produk budaya yang hilang atau memudar dapat dihasilkan kembali yang dapat menjadi bagian dari daya tarik daerah sekaligus dinikmati oleh masyarakat lebih luas.

5. Masyarakat yang sejahtera, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangun daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2017-2022 tersebut diatas, maka dapat dijelaskan pokok-pokok dan penjelasan visi tersebut pada tabel sebagai berikut:

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai upaya merealisasikan visi tersebut, adalah:

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional
2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional
4. *Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju
6. *Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.*

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.3.1 Tujuan

Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017-2022

MISI I	TUJUAN	SASARAN
Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat	Angka harapan hidup
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka
		Tingkat kemiskinan
	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	Indeks pembangunan pemuda
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK
		Nilai SAKIP
		Nilai EKPPD
		Indeks SPBE
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat	
MISI II	TUJUAN	SASARAN

Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Angka pola harapan pangan
	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air
		Indeks udara
		Indeks kualitas tutupan lahan
Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian lahan dengan RTRW	
MISI III	TUJUAN	SASARAN
Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proposional	Meningkatkan infrastruktur kewilayaan	Proporsi jalan kondisi baik (%)
		Persentase penduduk berakses air bersih
		Rasio irigasi dalam kondisi baik
	Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya	Jumlah rumah layak huni yang terbangun
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum
	Meningkatkan infrastruktur transportasi	Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi
MISI IV	TUJUAN	SASARAN
Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan investasi	Realisasi investasi PMDN dan PMA
		PMDN
		PMA

MISI V	TUJUAN	SASARAN
Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang maju	Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan	Jumlah koperasi aktif
		Jumlah BUMDES aktif
		Jumlah UMKM
MISI VI	TUJUAN	SASARAN
Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya	Meningkatkan destinasi wisata	Jumlah objek daya tarik wisata
	Pemasaran dan promosi wisata	Jumlah kunjungan wisata (org)
	Meningkatkan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan industri
Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama
	Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tabunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran dan strategi pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Strategi Pembangunan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

MISI PERTAMA
MENYIAPKAN SDM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik.	Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan.	Mencukupi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah.
3. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Mendorong kemampuan dan kenginan masyarakat dalam memperoleh pendidikan
4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal.	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
5. Meningkatnya minat baca masyarakat	Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat
6. Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan	Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa
7. Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
8. Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
9. Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan pada kecamatan yang memiliki kendala dalam keterjangkauan
10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat
11. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Menjamin kepastian kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan dan kerjasama para pihak
12. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

13. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Mengarahkan kemampuan teknis para calon pencari kerja kepada kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah
14. Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
15. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme
16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
17. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja	Membangun sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
18. Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan	Memaksimalkan penggunaan non APBD dalam mendukung pencapaian target pembangunan
19. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Menerapkan sistem nilai dan integrasi birokrasi yang efektif
20. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan
21. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Membangun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
22. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan
	Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa

MISI KEDUA

Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani	Meningkatkan kinerja pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi

2. Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan	Meningkatkan sumber informasi dan teknologi pertanian yang dapat diakses petani
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
3. Meningkatnya akses petani terhadap permodalan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
4. Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan	Meningkatkan dukungan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana terpadu
5. Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal	Melaksanakan revitalisasi sistem perbenihan
6. Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian	Meningkatkan minat masyarakat agar jumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa bertambah dan meningkatkan jumlah generasi muda yang menekuni profesi petani
7. Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan	Mengembangkan agroindustri perdesaan
8. Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan mutu dan mengembangkan standarisasi hasil pertanian
9. Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
10. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Melakukan pengamanan terhadap lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
11. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Meningkatkan pengelolaan DAS dan DTA
12. Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses	Melakukan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
13. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana	Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-prasarana penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah
14. Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi	Menginisiasi dan mendukung terbentuknya forum antar pihak pengelola kawasan konservasi
15. Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi	Membatasi pengembangan prasarana wilayah yang mendorong alih fungsi lahan konservasi
16. Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat	Menguatkan kelembagaan hukum adat
17. Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan	Meningkatkan masyarakat sadar kawasan konservasi

MISI KETIGA
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG
BERKUALITAS DAN PROPORSIONAL

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju kawasan
	Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan	Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas jalan
	Memelihara dan membangun prasarana dan sarana umum (infrastruktur) melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air	Mengembangkan transportasi air untuk meningkatkan akses, dan sebagai bagian dari pengembangan daya tarik wisata sungai.
4. Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Melakukan penataan kembali (<i>redesign</i>) permukiman kumuh
5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih	Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sekitar
	Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan air bersih
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik	Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk masyarakat
7. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Menciptakan standar dan pengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan sanitasi yang layak
8. Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler	Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap
	Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan telekomunikasi
9. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah

10. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
	Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional

**MISI KEEMPAT
MENCiptAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF**

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
2. Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
3. Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor <i>awareness</i> and <i>willingness</i> untuk berinvestasi di daerah
4. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan <i>collective bargaining</i> dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
5. Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
6. Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUMK	Mengembangkan dan menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan wirausaha, serta pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku KUMK
7. Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUMK	Mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga pembiayaan bank maupun non-bank bagi KUMK, serta advokasi pembiayaan bagi KUMK
8. Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUMK	Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk-produk KUMK yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal
9. Meningkatnya kemitraan KUMK dengan dunia usaha	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (<i>backward-forward linkages</i>)
10. Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD	Menguatkan tugas pokok dan fungsi serta daya saing BUMD melalui penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan sistem manajemen usaha BUMD

MISI KELIMA
MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENGOLAHAN YANG MAJU

SASARAN	STRATEGI
1. Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai.	Menetapkan destinasi wisata potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
	Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta
2. Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi	Menetapkan destinasi wisata di kawasan konservasi dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
	Mengembangkan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat
	Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen perencanaan di kawasan konservasi dan RIPDA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan
	Membangun dan menyediakan fasilitas wisata di kawasan konservasi sesuai arahan dokumen perencanaan di kawasan konservasi
3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata	Menyusun dan menetapkan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam pengelolaan kebersihan disertai dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan dan penyediaan infrastruktur yang memadai
	Mengembangkan <i>volunteer tourism</i> sebagai salah satu model wisata
4. Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Mengoptimalkan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
	Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal
5. Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata	Mendorong munculnya kelompok potensial dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan

6. Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata
7. Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya
	Menciptakan event-event wisata dan budaya yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah.
8. Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah	Menyelenggarakan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk
	Menyelenggarakan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata
9. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah	Melakukan pendampingan terhadap pelaku industri pengolahan dan menjamin kualitas proses produksi dari hulu hingga hilir
10. Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah	Meningkatkan kapasitas pelaku industri dan penguatan kelembagaan pelaku industry
11. Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan	Memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing
12. Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank	Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi umkm maupun koperasi
13. Meningkatnya akses pasar produk-produk industri pengolahan	Mengembangkan pemasaran dan promosi produk-produk IKM melalui even-even nasional maupun internasional dan diintegrasikan dengan paket pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya
	Mengembangkan industri pengolahan berskala ekspor
14. Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar	Meningkatkan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar
	Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM

MISI KEENAM
MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG
RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya lokal
2. Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya lokal	Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)
3. Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal	Mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya kebudayaan
	Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
4. Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	Mengintegrasikan pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
5. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama
6. Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan hidup beragama dan kebinekaan dalam bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kehidupan beragama serta bermasyarakat
7. Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan tata kelola dana sosial keagamaan
8. Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam	Meningkatkan tata kelola dan fungsi Islamic Center sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
9. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
10. Terciptanya lingkungan yang berketeladanan	Menyelenggarakan gerakan keteladanan di lingkungan aparat pemerintah daerah dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu (revolusi mental)
11. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda	Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya olahraga, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

12. Meningkatkan pemenuhan hak terhadap anak	Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak melalui penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah
--	--

2.4 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2020. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar selama tahun 2020 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Berikut ini perjanjian kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang akan diukur pencapaiannya pada Bab III laporan ini.

Tabel 2.3
Keterkaitan Misi, Sasaran dan Indikator
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kampar 2017-2022

Misi Pertama : Menyiapkan Sdm Yang Handal Dan Profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.	1 Angka rata-rata lama sekolah	10,25
	2 Harapan lama sekolah	13,75
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,5
3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Tingkat pengangguran terbuka	5,66
	2 Tingkat kemiskinan	6,25
4 Meningkatkan pembangunan kepemudaan	Indeks pembangunan pemuda	49,19
5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Opini BPK	WTP
	2 Nilai SAKIP	B
	3 Nilai EKPPD	3,01
	4 Indeks SPBE	2,94
6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	77,61

Misi Kedua: Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1. Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	111,74
2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Angka pola harapan pangan	64,21

3	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks kualitas air	71,86
		2	Indeks udara	85,12
		3	Indeks kualitas tutupan lahan	48,95
4	Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang		Persentase kesesuaian lahan dengan RTRW	84,69

Misi Ketiga : Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas dan Proporsional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	
1. Meningkatkan infrastruktur kewilayaan	1	Proporsi jalan kondisi baik (%)	55
	2	Persentase penduduk berakses air bersih	79,45
	3	Rasio irigasi dalam kondisi baik	75,18
2. Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya	1	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	300
	2	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	79,98
3. Meningkatkan infrastruktur transportasi		Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi	39

Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1. Meningkatkan investasi	1 Realiasi investasi PMDN dan PMA	99,19
	2 PMDN (Rp.)	120.000.000.000
	3 PMA (\$)	16.000.000
2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan	1 Jumlah koperasi aktif	288
	2 Jumlah BUMDES aktif	150
	3 Jumlah UMKM	6234

Misi Kelima : Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1. Meningkatkan destinasi wisata	Jumlah objek daya tarik wisata	90
2. Pemasaran dan promosi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan (org)	1.612.419
3. Meningkatkan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan industri	4,35

Misi Keenam : Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1 Meningkatkan kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100
2 Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah	1 Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan	43
	2 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12



A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) tersebut menyajikan penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2021 sesuai dengan target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator sasaran. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran didapatkan melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

 Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. 21 (dua puluh satu) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2021, memiliki indikator sasaran sebanyak 34 (tiga puluh empat), terdiri dari 11 (sebelas) indikator untuk misi I, 6 (enam) indikator untuk misi II, 6 (enam) indikator untuk misi III, 5 (lima) indikator untuk misi IV, 2 (dua) indikator untuk misi V dan 3 (tiga) indikator untuk misi VI.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									Kategori Capaian
			Capaian indikator \geq 100%		Capaian Indikator < 100%		Capaian Indikator < 100% Tetapi Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu		Tidak Dapat Diukur (NA)		Rata-rata Capaian	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	%	
1.	Misi Pertama	11	5	45,45	2	18,18	3	27,27	1	9,1	99,93	Memuaskan
2.	Misi Kedua	6	4	66,67	2	33,33	0	0	0	0	112,81	Memuaskan
3.	Misi Ketiga	6	4	66,66	1	16,67	1	16,67	0	0	143,30	Memuaskan
4.	Misi Keempat	5	5	100	0	0	0	0	0	0	2934,38	Memuaskan
5.	Misi Kelima	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33	0	0	96,71	Memuaskan
6.	Misi Keenam	3	0	0	3	100	0	0	0	0	40,98	Kurang
Jumlah		34	19	55,88	9	26,47	5	14,70	1	2,94	571,35	Memuaskan

Selanjutnya analisis pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator pada tahun 2021 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional.

Pada misi pertama terdapat 6 (enam) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 indikator kinerja sasaran (45,45%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 3 indikator kinerja sasaran (27,27%) tidak mencapai target tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya;
3. Sebanyak 2 indikator kinerja sasaran (18,18%) tidak mencapai target;
4. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (9,1%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi pertama adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Angka rata-rata lama sekolah	9,50	9,75	10,09	10,25	10,25	9,60	93,66%	^	
Harapan lama sekolah	13,37	13,45	13,57	13,75	13,75	13,55	98,55	^	
		Rata-Rata Capaian Tahun 2021					96,11%	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan untuk tahun 2021 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 96,11%.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Angka rata-rata lama sekolah

Diperoleh data bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah 9,60 Tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,60 tahun atau setara tamat kelas 9 SMP. Rumus Angka Rata-rata lama sekolah adalah :

ARLS

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas sedang sekolah atau sudah berijazah}}{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan}}$$

Angka rata-rata lama sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 10,25 tahun terealisasi sebesar 9,60 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 93,66%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi capaian kinerja indikator angka rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan.

Harapan lama sekolah

Realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2021 adalah 13,55% dari target sebesar 13,75% atau dengan capaian 98,55%. Ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja harapan lama sekolah ini mengalami sedikit kenaikan. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Angka Harapan Hidup	69	71,1	70,1	71,5	71,5	70,83	99,06	^	
			Rata-Rata Capaian Tahun 2021					99,06	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

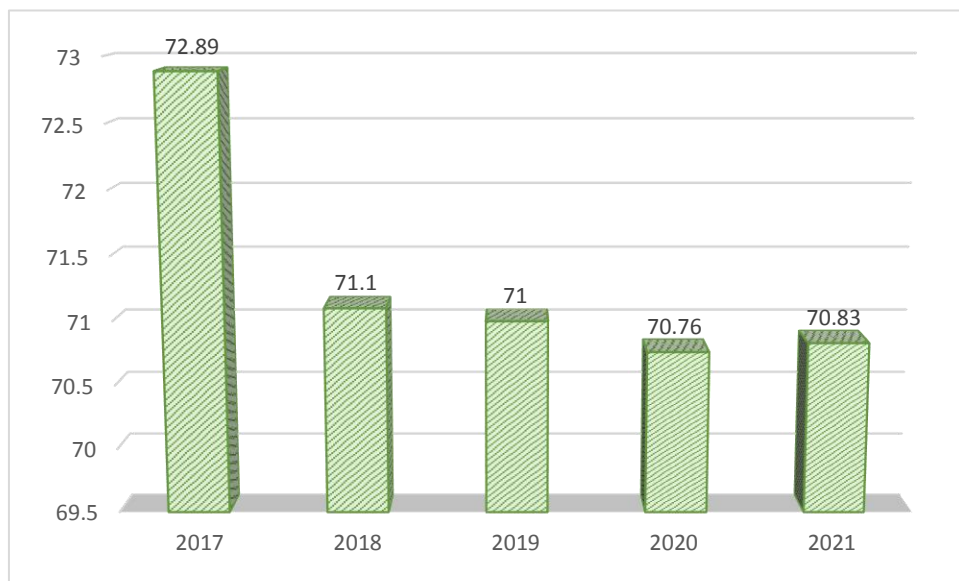
Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 99,06%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup

Indikator kinerja angka harapan hidup untuk tahun 2021 terealisasi 70,83% dari target 71,5% dengan nilai capaian 99,06% dengan kategori Memuaskan (AA). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini mengalami sedikit kenaikan. Capaian angka harapan hidup dari tahun 2017-2021 berturut-turut yaitu 72,89%, 71,1%, 71%, 70,76. Dan 70,83 Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.1
Angka Harapan Hidup

**Sasaran 3****Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD	
	Tingkat Pengangguran terbuka	8,07	8,07	7,99	5,66	5,66	4,27	132,55%	V	
Tingkat kemiskinan	8,02	8,18	8,18	6,25	6,25	7,82	79,92%	X		
		Rata-Rata Capaian Tahun 2021						106,24%	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat capaian sasaran 3 (tiga) dengan kategori Baik Sekali (A) dengan rata-rata capaian 88,36%.

Penjelasan untuk masing-masing indikator di atas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi capaian Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tahun 2021 sebanyak 4,27% dari target 5,66% atau dengan nilai capaian sebesar 132,55%. Jumlah Pengangguran di Kabupaten Kampar berkurang sebanyak 16. 797 orang bula dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan strategi memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

2. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan persentasenya, penduduk miskin Kabupaten Kampar meningkat menjadi 7, 82% pada maret 2021 dibanding sebelumnya hanya 7,38% atau meningkat 3,400 jiwa pada maret 2020 sehingga menjadi 68.740 jiwa pada maret 2021. Angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Riau yang

sebesar 7, 12% dan merupakan yang terbesar kelima dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.

Pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk meredam penularan Covid-19 berdampak terhadap perekonomian hampir di semua wilayah, begitu juga di Kabupaten Kampar. Banyak kegiatan ekonomi yang berhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja, penurunan tingkat produktivitas individu dan perusahaan, sehingga mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Merespons dampak pandemic Covid-19, Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai program jaringan pengaman sosial. Bantuan cepat dan bersifat jangka pendek berupa program sembako serta bantuan listrik gratis. Bantuan jangka pendek ini diberikan untuk mengatasi turunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan dan non pangan. Sedangkan program jangka menengah berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT) dana desa dan kartu prakerja.

Sasaran 4	Meningkatnya pembangunan kepemudaan
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Indeks pembangunan pemuda	N/A	N/A	48,76	49,19	49,19	N/A	N/A	N/A	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								N/A	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Tidak didapat data realisasi capaian target mengenai indikator kinerja indeks pembangunan pemuda untuk tahun 2021.

Sasaran 5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	V	WTP
Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B	B	100%	V	BB
Nilai EKPPD	N/A	N/A	3	3,01	3,01	3,01	100%	V	
Indeks SPBE	N/A	N/A	2,97	2,94	2,94	1,67	56,80%	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								89,2%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa sasaran meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. 3 (tiga) yakni Opini BPK, Nilai SAKIP dan Nilai EKPPD berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian masing-masing 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah berhasil mencapai sasaran dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yakni indeks SPBE tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Opini BPK

Indikator kinerja Opini BPK terealisasi dengan capaian 100%. Sama dengan tahun sebelumnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Capaian opini tersebut diperoleh melalui meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK atas laporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

2. Nilai SAKIP

Indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat B dengan nilai 62,30. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memperlihatkan hasil yang baik namun masih memerlukan banyak perbaikan yang sifatnya tidak mendasar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan hasil yang sama.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2021 kepada Presiden RI melalui Kementerian PANRB tepat waktu. Penyajian informasi kinerja telah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan lagi dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah dengan melengkapi penyajian data kinerja dalam laporan kinerja dengan penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Nilai EKPPD

Nilai EKPPD untuk tahun 2021 juga belum di publish Kementerian Dalam Negeri.

4. Indeks SPBE

Indikator kinerja indeks SPBE tahun 2021 tercapai 1,67% dari target sebesar 2,94% atau dengan capaian 56,80%. Capaian tahun ini turun atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena selama 2 (dua) tahun berturut-turut Indonesia dilanda pandemic Covid-19 dimana dana untuk jaringan aplikasi internet server direcofusing ke dana covid.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari Domain, Aspek, dan Indikator. Tiga domain diantaranya domain kebijakan, domain tata kelola, domain SPBE, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai. Kedua Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai dan ketiga Indikator, yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Ada tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah

Sasaran 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Indeks kepuasan masyarakat	100	100	76,61	77,61	77,61	84,63	109,04%	V	100
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								109,04%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 109,04%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan masyarakat

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik pada tahun 2021 tercapai sebesar 84,63% dari target sebesar 77,61% atau dengan capaian 109,04%. Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang telah disebar kepada 2.693 orang responden pada 9 (Sembilan) unit pelayanan yang disurvei tahun 2021, menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing unit sebagai berikut :

- 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 91,37 (Kategori A/Sangat Baik)
- 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 79,76 (Kategori B/Baik)
- 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 82,69 (Kategori B/Baik)

- 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 86,42 (Kategori B/Baik)
- 5 Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 83,14 (Kategori B/Baik)
- 6 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 90,53 (Kategori A/Sangat Baik)
- 7 Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 80,71 (Kategori B/Baik)
- 8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 81,93 (Kategori B/Baik)
- 9 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar dengan nilai IKM : 81,33 (Kategori B/Baik).

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 9 (Sembilan) unit pelayanan yang di survey ternyata persentase kinerja unit pelayanan public diapresiasi oleh masyarakat dengan penilaian 22% “SANGAT BAIK”, dan 88% “BAIK”, tidak ada yang menilai “TIDAK BAIK”.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana SKM Kabupaten Tahun 2021, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) antara lain :

- 1 UPP belum memahami aturan terkait pelaksanaan SKM, sehingga masih ada UPP yang tidak melaksanakan SKM dan juga terdapat UPP yang melaksanakan SKM tidak berdasarkan Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2 Keterbatasan SDM UPP yang menangani pelaksanaan SKM secara intens.
- 3 Keterbatasan anggaran apabila SKM dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- 4 Ketidakbersediaan responden untuk mengisi kuisisioner.
- 5 Pertanyaan kuisisioner yang tidak mudah dipahami responden.

Selain itu hasil dari pelaksanaan SKM ini menjadi masukan untuk perbaikan di setiap UPP terkait dengan unsur penilaian yang masih rendah. Unsur pelayanan tersebut akan menjadi perhatian untuk ditingkatkan, dan bagi unsur pelayanan yang sudah dinilai sangat baik oleh masyarakat pengguna layanan akan dipertahankan bila perlu dilakukan peningkatan sehingga mencapai nilai yang optimal.

Misi Kedua : Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pada misi kedua terdapat 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 indikator kinerja sasaran (67%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 2 indikator kinerja sasaran (33%) tidak mencapai target.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kedua adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Nilai Tukar Petani	N/A	N/A	90,3	111,74	111,74	150,07	134,30	V	
Rata-rata Capaian Tahun 2021								116,65	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP Provinsi Riau Desember 2021 sebesar 152,18 atau naik sebesar 2,56 persen dibanding NTP November 2021 sebesar 148,38. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,18 persen relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yaitu sebesar 0,60 persen. Pada Desember 2021, seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami Kenaikan NTP. Riau tercatat sebagai provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi yaitu naik sebesar 2,56 persen. Sementara Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan NTP paling kecil di Pulau Sumatera yaitu sebesar 0,09 persen. Pada Desember 2021, terjadi kenaikan indeks harga konsumsi rumah tangga pertanian di Provinsi Riau sebesar 0,26 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan hampir pada seluruh kelompok konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 1,63 persen, yaitu dari 147,66 persen pada November 2021 menjadi 150,07 pada Desember 2021.

Tabel 3.10
 Nilai Tukar Petani Gabungan Provinsi Riau Desember 2021 (2018=100)

Rincian	Indeks Gabungan Riau		% Perubahan
	November 2021	Desember 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Harga yang Diterima Petani	161,11	166,23	3,18
Indeks Harga yang Dibayar Petani	108,58	109,23	0,60
Konsumsi Rumah Tangga	108,37	108,66	0,26
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,14	109,54	0,36
Pakaian dan Alas Kaki	109,73	110,02	0,26
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,17	104,41	0,23
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	111,84	112,19	0,32
Kesehatan	107,27	107,60	0,32
Transportasi	108,22	108,25	0,03
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	105,75	105,62	-0,12
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	104,30	104,31	0,01
Pendidikan	103,29	103,31	0,02
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	106,37	106,46	0,09
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	111,65	111,84	0,17
BPPBM	109,11	110,77	1,52
Bibit	105,93	107,48	1,46
Pupuk, Obat-Obatan, dan Pakan	113,70	117,31	3,17
Sewa dan Pengeluaran Lainnya	103,10	104,84	1,69
Transportasi Dan Komunikasi	107,10	107,40	0,28
Barang Modal	106,04	106,21	0,16
Upah Buruh	106,34	106,36	0,01
Nilai Tukar Petani	148,38	152,18	2,56
Nilai Tukar Usaha Pertanian	147,66	150,07	1,63

Tabel 3.11
 Nilai Tukar Petani Gabungan Provinsi Riau Desember 2021 (2018=100)

Subsektor	Bulan		% Perubahan
	November 2021	Desember 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	98,67	98,98	0,32
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	109,05	109,50	0,41
c. Nilai Tukar Petani (NTPP)	90,48	90,40	-0,09
2. Hortikultura			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	101,74	102,59	0,83
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,26	108,66	0,36
c. Nilai Tukar Petani (NTPH)	93,98	94,41	0,47
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	173,35	179,45	3,52
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,60	109,32	0,66
c. Nilai Tukar Petani (NTPR)	159,62	164,16	2,84
4. Peternakan			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	108,28	109,17	0,82
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,26	108,50	0,22
c. Nilai Tukar Petani (NTPT)	100,02	100,62	0,59
5. Perikanan			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	112,46	112,55	0,08
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,14	108,47	0,31
c. Nilai Tukar Petani (NTNP)	103,99	103,75	-0,23
5.1 Perikanan Tangkap			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	114,82	115,09	0,24
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,18	108,46	0,26
c. Nilai Tukar Petani (NTN)	106,14	106,11	-0,02
5.2 Perikanan Budidaya			
a. Indeks Harga yang Diterima (It)	104,94	104,41	-0,51
b. Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	108,03	108,50	0,44
c. Nilai Tukar Petani (NTPi)	97,14	96,23	-0,94
Riau			
a. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	161,11	166,23	3,18
b. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	108,58	109,23	0,60
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	148,38	152,18	2,56

Kenaikan NTP di Provinsi Riau pada bulan Desember 2021 terjadi pada 3 (tiga) subsektor penyusun NTP. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 2,84 persen, lalu diikuti kenaikan NTP pada subsektor Peternakan sebesar 0,59 persen dan diikuti subsektor Hortikultura yaitu naik sebesar 0,47

persen. Sedangkan 2 (dua) subsektor penyusun NTP lainnya mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada Subsektor Perikanan sebesar 0,23 persen dan diikuti penurunan NTP pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,09 persen seperti terlihat di Tabel 3.11.

Sasaran 2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
	Angka Pola Harapan Pangan	89,60	90,91	91,82	64,21	64,21	88,87	138,40	V
Rata-rata Capaian Tahun 2021								138,40	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu parameter untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Pola konsumsi masyarakat dijabarkan dalam bentuk jumlah dan keanekaragaman bahan pangan yang dikonsumsi, pemenuhan angka kecukupan gizi, keseimbangan gizi, daya terima masyarakat dan kemampuan daya beli. PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik ditingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Susunan Pola Pangan Harapan nasional (sesuai Harmonisasi Ketahanan Pangan 2015) menjadi pedoman dalam perhitungan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2021 dengan pendekatan PPH seperti yang disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) FAO dan Nasional

No	Kelompok Pangan	% AKG FAO	% AKG Nasional (%)	Konsumsi Energi (Kkal)	Konsumsi Pangan (gram/kap/hari)	Bobot	Skor
1	Padi-Padian	40,0	50,0	1.075,0	275	0,5	25,0
2	Umbi-Umbian	5,0	6,0	129,0	100	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	20,0	12,0	258,0	150	2,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	10,0	10,0	215,0	20	0,5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	3,0	3,0	64,5	10	0,5	1,0
6	Kacang-Kacangan	6,0	5,0	107,5	35	2,0	10,0
7	Gula	8,0	5,0	107,5	30	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	5,0	6,0	112,0	250	5,0	30,0
9	Lainnya	3,0	3,0	64,5	-	0,0	0,0
	Jumlah	100	100,0	2.150	-	-	100

Tabel 3.14
Pola Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kampar Berdasarkan Skor PPH
Tahun 2021

No	Jenis Bahan Pangan	Rata-rata Kons/hari /kel (g)	Rata-rata Kons/hari/ kap(g)	Energi/ kap/hari (Kkal)	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH 2021
1	Padi-Padian	1.833,13	388,19	1.371,09	60,70	63,77	0,5	31,89	25	25
2	Umbi-Umbian	426,52	90,32	105,82	4,68	4,92	0,5	2,46	2,5	2,46
3	Pangan Hewani	704,03	149,09	241,10	10,67	11,21	2,0	22,43	24	22,43
4	Minyak dan Lemak	96,66	20,47	183,90	8,14	8,55	0,5	4,28	5	4,28
5	Buah/Biji Berminyak	98,75	20,91	60,64	2,68	2,82	0,5	1,41	1	1
6	Kacang-kacangan	189,44	40,12	81,72	3,62	3,80	2,0	7,60	10	7,60
7	Gula	191,35	40,52	108,97	4,82	5,07	0,5	2,53	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	566,10	119,88	105,74	4,68	4,92	5,0	24,59	30	24,59
9	Lainnya	47,91	10,15	-	0,00	1,90	-	-	-	-
Jumlah		4.153,89	879,65	2.258,98	100,00	105,07				89,86

Sumber: Hasil olahan data survei, 2021

Keterangan: Kons/ hari/kel = konsumsi per hari per keluarga

Kons/hari/kap = konsumsi per hari per kapita

Kkal = Kilo Kalori

Tabel 3.15
Skor PPH 2019 - 2021 dan Proyeksi PPH Tahun 2022-2025 Kabupaten
Kampar

No	Jenis Bahan Pangan	Skor PPH dan Proyeksi PPH Kab. Kampar					
		2019*	2021**	2022	2023	2024	2025
1	Padi-Padian	25	25	25	25	25	25
2	Umbi-Umbian	2,47	2,46	2,48	2,49	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	22,72	22,43	22,79	22,93	22,98	23,33
4	Minyak dan Lemak	4,55	4,28	4,33	4,51	4,53	4,57
5	Buah/Biji Berminyak	1	1	1	1	1	1
6	Kacang-kacangan	5,82	7,60	7,67	7,75	7,88	8,12
7	Gula	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	24,81	24,59	24,76	24,95	26,00	26,06
9	Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah		88,87	89,86	90,53	91,14	92,39	93,08

Sumber: Hasil olahan data survei, 2021 (*PPH Kampar Hasil Survey 2019; **PPH Kampar Hasil Survey 2021)

Tabel 3.16
Proyeksi PPH Berdasarkan Kontribusi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (%AKE) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025

No	Jenis Bahan Pangan	Proyeksi PPH Berdasarkan Kontribusi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (% AKE)						
		% AKE Anjuran	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-Padian	50,00	63,13	63,77	64,33	63,09	62,18	61,26
2	Umbi-Umbian	6,00	4,94	4,92	4,96	4,98	5,00	5,03
3	Pangan Hewani	12,00	11,36	11,21	11,40	11,47	11,49	11,67
4	Minyak dan Lemak	10,00	9,09	8,55	8,65	9,02	9,07	9,15
5	Buah/Biji Berminyak	3,00	3,00	2,82	2,82	2,83	2,84	2,89
6	Kacang-kacangan	5,00	2,91	3,80	3,84	3,88	3,94	4,06
7	Gula	5,00	5,00	5,07	5,11	5,08	5,07	5,03
8	Sayur dan Buah	6,00	4,96	4,92	4,95	4,99	5,20	5,21
9	Lainnya	3,00	1,40	1,90	1,90	1,92	1,92	1,93
Jumlah (% AKE)		100,00	105,80	105,07	106,07	105,33	104,79	104,30

Sumber: Hasil olahan data survei, 2021

Tabel 3.17
Proyeksi PPH Berdasarkan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (Kkal) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025

No	Jenis Bahan Pangan	Proyeksi PPH Berdasarkan konsumsi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan (Kkal)						
		Konsumsi Energi Anjuran ¹	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-Padian	1.075,00	1.357,35	1.371,09	1.383,15	1.356,51	1.336,93	1.317,11
2	Umbi-Umbian	129,00	106,30	105,82	106,66	106,97	107,59	108,14
3	Pangan Hewani	258,00	244,24	241,10	245,04	246,55	247,01	250,83
4	Minyak dan Lemak	215,00	195,46	183,90	186,08	193,84	194,98	196,69
5	Buah/Biji Berminyak	64,50	65,41	60,64	60,72	60,82	61,14	62,18
6	Kacang-kacangan	107,50	62,62	81,72	82,47	83,35	84,67	87,27
7	Gula	107,50	109,70	108,97	109,97	109,29	108,96	108,22
8	Sayur dan Buah	159,00	106,67	105,74	106,45	107,29	111,80	112,05
9	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah (Kkal/kap/hari)		2.150,00	2.247,75	2.258,98	2.280,54	2.264,62	2.253,09	2.242,51

Sumber: Hasil olahan data survei, 2021

¹Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan pangan Nasional, 2015

Tabel 3.18
Proyeksi PPH Berdasarkan Rata-Rata Konsumsi Pangan Menurut Kelompok Bahan Makanan (Gram/Kap/Hari) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2025

No	Jenis Bahan Pangan	Proyeksi PPH Berdasarkan Konsumsi Pangan (gram/ kap/ hari)						
		Konsumsi Pangan (g) Anjuran ¹	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-Padian	275,00	384,81	388,19	387,65	385,48	383,56	382,74
2	Umbi-Umbian	100,00	92,77	90,32	90,56	90,68	92,03	93,05
3	Pangan Hewani	150,00	154,72	149,09	149,65	149,86	149,95	150,00
4	Minyak dan Lemak	20,00	21,75	20,47	20,16	20,07	20,00	20,00
5	Buah/Biji Berminyak	10,00	22,56	20,91	19,85	19,13	18,74	18,09
6	Kacang-kacangan	35,00	40,40	40,12	39,26	38,48	37,84	36,98
7	Gula	30,00	40,77	40,52	40,03	39,75	38,69	38,04
8	Sayur dan Buah	250,00	124,20	119,88	121,01	123,45	124,86	125,68
9	Lainnya	-	11,06	10,15	10,05	9,85	9,50	9,25
Jumlah (gram/kap/hari)		870,00	893,02	879,65	878,22	876,75	875,17	873,83

Sumber: Hasil olahan data survei, 2021

¹Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan pangan Nasional, 2015

Konsumsi pangan Kabupaten Kampar pada tahun 2021 berdasarkan pada kelompok padi-padian (Beras, Jagung, dan Terigu) memiliki persen angka kecukupan energi (AKE) sebesar 63,77% dengan skor AKE 31,89 melebihi dari skor AKE seharusnya 25, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar masih tinggi mengkonsumsi beras, sementara konsumsi jagung dan terigu relatif masih rendah. Untuk memenuhi pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Kampar yang baik maka masyarakat disarankan untuk mengurangi konsumsi beras, dan meningkatkan konsumsi jagung dan terigu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sumber karbohidrat dari jenis padi-padian. Jumlah konsumsi beras, jagung, dan terigu setiap hari/kapita sebaiknya sebanyak 275 gram dengan proporsi makanan yang seimbang dari beras, jagung, maupun terigu.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.14 sampai dengan Tabel 3.18 diketahui bahwa skor PPH Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah 88,87, dan skor PPH ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 dengan skor PPH 83,69. Namun demikian, skor PPH Kabupaten Kampar masih belum mencapai skor PPH anjuran yaitu 100. Untuk mencapai PPH anjuran tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam perbaikan konsumsi pangan terhadap masing-masing jenis bahan pangan, sehingga tercapai jumlah dan variasi

yang banyak dalam Kabupaten Kampar konsumsi pangan dan tercapai keseimbangan gizi masyarakat.

Berdasarkan uraian dari skor PPH dan kecukupan jumlah konsumsi sebelumnya diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Kampar sudah mengacu kepada Pedoman Umum Gizi Seimbang yaitu Menu 4 sehat 5 Sempurna yang diketahui dari keragaman bahan pangan yang dikonsumsi per individu per hari menurut jumlahnya. Secara umum kebutuhan jumlah zat gizi menurut kelompok bahan makanan sudah mencukupi kecuali kebutuhan lemak, sedangkan keragaman jenis bahan pangan dalam kelompok masih rendah. Perilaku konsumsi masyarakat Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh kondisi wilayah, selera, preferensi, harga komoditas, tingkat penghasilan dan pendidikan Kepala Keluarga, tingkat pengetahuan bu rumah tangga dan budaya masyarakat. Masyarakat Kampar menjadikan beras sebagai makanan utama, ikan dan telur sebagai sumber protein hewani.

Manfaat lain penghitungan pola konsumsi dengan skor PPH adalah dapat menyusun pola konsumsi dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi penduduk di masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai waktu tahun proyeksi 2020-2024. Dengan model yang sudah ditetapkan, dapat diketahui skor PPH Kabupaten Kampar yang memenuhi skor PPH anjuran yang ditetapkan, yaitu PPH nasional dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi yang mendukung tercapainya pola konsumsi yang menjamin terpenuhinya angka kecukupan gizi masyarakat baik angka kecukupan energi, angka kecukupan protein, angka kecukupan lemak, angka kecukupan vitamin dan mineral.

Berdasarkan data pada tabel tersebut untuk mencapai tujuan dari kecukupan gizi masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas, ada beberapa kelompok bahan pangan yang jumlah konsumsinya dikurangi dan ada yang harus ditingkatkan sehingga asupan gizi dari setiap kelompok bahan pangan tersebut seimbang menurut kelompok gizi. sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang yaitu menu 4 sehat 5 sempurna jika diikuti dengan mengkonsumsi bahan pangan yang beragam menurut kelompok bahan pangan dengan jumlah yang sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan (minimal 2.150 kkal), maka status gizi masyarakat di suatu daerah akan baik karena angka pemenuhan gizinya terpenuhi.

Sasaran 3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target	Target	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
	2017	2018	2019	2020	2021				
1. Indeks Kualitas Air	92,72	95,52	64,56	71,86	71,86	63,33	88,13	X	
2. Indeks Udara	87,32	94,45	87,32	85,12	85,12	89,00	104,56	V	
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan				48,95	48,95	46,92	95,85	X	
Rata-rata Capaian Tahun 2021								96,18	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka, gubernur, bupati/wali kota dalam Menyusun RPKMD wajib :

- a. Menetapkan target IKLH ke dalam RPJMD sebagaimana tercantum Lampiran Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan;
- b. Menyusun program perbaikan kualitas air, udara, lahan, dan laut untuk meningkatkan nilai IKLH;
- c. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang diperlukan untuk menghitung IKLH dengan tahapan menetapkan titik pemantauan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan sesuai dengan metodologi dan parameter yang ditetapkan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik; dan
- e. Melakukan pelaporan melalui system informasi indeks kualitas lingkungan hidup.

Acuan dalam Menyusun target IKLH untuk setiap provinsi., kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Sasaran 4	Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
	Indeks kualitas tutupan lahan	NA	NA	NA	84,69	84,69	84,70	100	V
Rata-rata Capaian Tahun 2021								100	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang diterima di lapangan, Indikator Kinerja tentang Indeks kualitas tutupan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang tahun 2021 telah mencapai target dengan capaian 84,70%. Hal ini tercapai dengan memberikan mengeluarkan perizinan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar 2019 – 2039.

Misi Ketiga : Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional

Pada misi ketiga terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (66,66) mencapai atau melebihi target
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67) tidak mencapai target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67) tidak mencapai target

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi ketiga adalah:

Sasaran 1	Meningkatkan infrastruktur kewilayahan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Proporsi jalan kondisi baik (%)	65%	80%	42,41%	55%	74,77%	59,94	82,84%	^	
2. Persentase penduduk berakses air bersih	70%	76%	67,44%	79,45%	89,94%	85,96%	101,65%	V	
3. Rasio irigasi dalam kondisi baik	-	-	43,81%	75,18%	51,80%	70,33%	135,16%	V	
							Rata-Rata Capaian Tahun 2021	106,55%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran Meningkatkan infrastruktur kewilayahan tahun 2021 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 106,55%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Jalan Kondisi Baik (%)

Indikator kinerja Proporsi Jalan Kondisi Baik tahun 2021 terealisasi sebesar 59,94% dari target yang ditetapkan sebesar 55% atau dengan capaian 82,84%. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp. 121.586.091.770 atau sebesar 75,39%.

2. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Indikator kinerja persentase Penduduk Berakses Air Bersih tahun 2021 terealisasi sebesar 85,96% dengan capaian 101,65% dari target 89,94%. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp. 10.679.801.904 atau sebesar 6,62%.

3. Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja Rasio irigasi dalam kondisi baik tahun 2021 terealisasi sebesar 70,33% dengan capaian sebesar 135,16% dari target 51,80%. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp. 7.015.000.243 atau sebesar 4,35%.

Sasaran 2	Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Jumlah rumah layak huni yang terbangun		97,38	98,17	300 unit	300 unit	1.275 unit	425%	V	
Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	20 Paket	44 Paket	96,85	79,98	79,98	17,40	21,73%	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								223,36%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya tahun 2021 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 223,36%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rumah layak huni yang terbangun

Indikator kinerja Jumlah rumah layak huni yang terbangun Tahun 2021 terealisasi melebihi target yaitu sebesar 425% atau sebanyak 1.275 unit dari target 300 unit. Tercapainya target ini karena adanya upaya sosialisasi, desiminasi, dan melakukan survey ke desa-desa. Juga melakukan koordinasi ke Provinsi dan ke Pusat/Kementrian. Terwujudnya Rumah Layak Huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat Perumahan yang sehat, aman, terpadu dan berkelanjutan merupakan wujud nyata kinerja yang akan dicapai setiap individu pemangku jabatan dibidang masing-masing.

2. Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Indikator kinerja Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya terealisasi sebesar 17,40% atau hanya terealisasi sebanyak 65 lingkungan dari target 374 lingkungan. Tidak tercapainya target ini karena :

- Jangkauan pelayanan PSU yang belum menyeluruh;
- Luasnya daerah penyelenggaraan.

Sasaran 3	Meningkatkan infrastruktur transportasi
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi	15,1%	18,1%	36%	39%	39%	39%	100%	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								100	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatkan infrastruktur transportasi mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Ketersediaan Infrastruktur Transportasi

Indikator Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi Tahun 2021 terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi Kabupaten Kampar. Disamping itu juga mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah.

Misi Keempat : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Pada misi keempat terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 5 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 indikator kinerja sasaran (100%) mencapai atau melebihi target;

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran terhadap misi keempat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatkan investasi.
------------------	--------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
Realisasi Investasi PMDN (Rp.) PMA (\$)									
1. PMDN (rupiah)	50.000.000.000	75.000.000.000	665.200.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	4.966.374.500.000	4.138,65	V	
2. PMA (\$)	12.000.000	14.000.000	164,4	16.000.000	16.000.000	208.607.040	1.303,79	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021							2.721,22	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Kampar dengan nilai capaian 5.442,44% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2020 menunjukkan bahwa ke dua indikator kinerja mencapai target yang sangat memuaskan.

Penjelasan untuk indikator kinerja PMDN (Rp) dan PMA (dollar)) sebagai berikut:

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan *Indikator Kinerja jumlah nilai investasi* di Kabupaten Kampar dari target sebesar Rp. 120 Milyar untuk PMDN dan 16 Juta \$ untuk PMA, dari jumlah PMDN + PMA dapat terealisasi mencapai sebesar Rp.7.914.800.700.000, sehingga realisasi pencapaian tercatat 2.721,22 %.

Tabel 3.25
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek,
Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Uraian	Tahun		Laju Pertumbuhan (%)
		2020	2021	
1	Jumlah Total Proyek : a. PMA (buah)	95	106	111,57
	b. PMDN (buah)	356	593	166,29
2	Jumlah Total Investasi : a. PMA (Rp.)	239.961.600.000	2.984.426.200.000	1243,70
	b. PMDN (Rp.)	7.341.372.100.000	4.966.374.500.000	67,64
3	Penyerapan Tenaga Kerja : a. PMA (Orang)	3.004	1.282	42,67
	b. PMDN (Orang)	15.198	9.362	61,60

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2021 (s/d TWR IV)

Dari tabel 3.25 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2021 tercatat sebanyak 699 proyek/usaha. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah proyek/usaha sebanyak 451 proyek terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 154,98 %. Begitu juga terhadap serapan tenaga kerja tahun 2021 sebanyak 10.644 orang, dari jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 58,47 % dibanding tahun 2020 sebanyak 18.202 orang.

Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2021 PMA/PMDN meliputi 15 sektor usaha saja, secara rinci dapat dilihat seperti table berikut ini :

Tabel 3.26
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha,
Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021 (setelah dikonversi ke Rupiah)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp.)		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	Industri Kimia dan Farmasi	16.138.840.000	32.708.300.000	48.847.140.000
2	Tan.Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1.727.153.720.000	919.921.600.000	2.647.075.320.000
3	Industri Makanan	168.875.280.000	753.822.400.000	922.697.680.000
4	Hotel dan Restoran	0	90.000.000	90.000.000
5	Jasa Lainnya	0	500.000.000	500.000.000
6	Industri Lainnya	0	14.326.400.000	14.326.400.000
7	Industri Kertas & Percetakan	0	23.000.000.000	23.000.000.000
8	Konstruksi	0	2.236.515.700.000	2.236.515.700.000
9	Perdagangan dan Referasi	3.531.740.000	144.543.400.000	148.075.140.000
10	Transportasi, Gudang & Telkom	0	8.780.000.000	8.780.000.000
11	Industri Karet dan Plastik	31.686.380.000	56.988.100.000	88.764.840.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	0	14.309.600.000	14.309.600.000
13	Industri Kayu	0	17.200.000.000	17.200.000.000
14	Industri Mineral dan Non logam	0	143.735.900.000	143.735.900.000
15	Pertambangan	0	210.000.000	210.000.000
16	Listrik Gas dan Air	0	5.480.000.000	5.480.000.000
	Total PMA + PMDN	2.984.426.200.000	4.966.374.500.000	7.914.800.700.000

Sasaran 2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.27
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Jumlah koperasi aktif	250	250	150	288	288	528	183,33	V	
2. Jumlah BUMDES aktif		240	250	150	150	242	161,33	V	
3. UMKM	5.421	5.490	6.234	6.535	6.234	18.380	294,83	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021							213,16	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan dengan nilai capaian 213,16% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2021 menunjukkan bahwa ke tiga indikator kinerja mencapai target yang sangat memuaskan.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ditentukan oleh faktor-faktor pengaruh baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal (analisa SWOT) merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (strengths), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities) dan Tantangan/Kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar .

Adapun faktor-faktor atau unsur-unsur dari analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. KEKUATAN (STRENGTH)

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sesuai perda diberikan amanah membantu sebagian tugas pemerintah daerah dalam melakukan

pembinaan/pemberdayaan Koperasi dan UMK, oleh karena itu peran dan posisinya dalam pembinaan/pemberdayaan koperasi dan UMK tidak saja penting tetapi juga strategi khususnya dalam rangka mendukung percepatan kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran .

Seiring dengan itu Komitmen aparaturnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk kembali kepada 5 pilar pembangunan Kabupaten Kampar, sebagai dimensi baru bagi pemberdayaan Pasar, Koperasi dan UMK. Komitmen ini merupakan bagian penting, untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan.

Disadari bahwa koperasi dan UMK telah memberikan berbagai sumbangan dalam proses pembangunan daerah. Dari pendataan akhir tahun 2021, diketahui jumlah pelaku UMK mencapai 18.380 unit. Jumlah ini berarti bahwa UMK merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 90% dari seluruh pelaku ekonomi Kabupaten Kampar. Keberadaan jumlah UMK yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok kelurahan/desa, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi regional dan nasional.

Potensi koperasi dapat dilihat dari jumlah Koperasi hingga akhir 2021 sebanyak 528 unit yang diperkirakan setiap tahunnya akan terus meningkat, potensi lain koperasi juga dapat dilihat dari jumlah anggota yang hingga akhir tahun 2021 mencapai 109.938 orang. Sedangkan dilihat dari aset berupa modal sendiri, Koperasi hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp. 439.539 miliar, selain daripada itu Koperasi juga mengelolah modal luar yang mencapai Rp. 321.837 miliar.

Hal diatas memperlihatkan bahwa keterkaitan Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan masyarakat. Bahkan keberadaannya merupakan kekuatan utama dibidang kredit mikro disekitar wilayah kerjanya melalui USP dan KSP. Dilihat dari volume usaha Koperasi, pada tahun 2021 mencapai lebih dari Rp. 887.697 miliar, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi secara menyeluruh mencapai Rp. 39.339 miliar

Dari sisi pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMK terdapat Aparatur pembina di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, sarana dan prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam menjalankan pembinaan/pemberdayaan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hingga tahun 2021 sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang PNS, dan 35 (Tiga Puluh Lima) orang Honorer, dan 5 (Lima) Orang Tenaga Pendamping. satu unit gedung yang dapat dipergunakan untuk rapat-rapat pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK.

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Perdagangan, Koperasi dan UMK masih menghadapi banyak kendala. Kelembagaan Usaha Koperasi dan UMK merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Kopersai dan UMK. Perlu digarisbawahi bahwa lebih dari 6.462 usaha yang ada atau lebih dari 90% pelaku usaha adalah usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang, karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis, disamping itu pula badan usaha perorangan kebanyakan usaha dagang dikelola secara tertutup dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai, jumlah usaha sektor riil berkembang lambat, kebanyakan pelaku usaha baru lebih memilih usaha dagang/riteil dan usaha dari pasar ke pasar. Upaya pemberdayaan UMK ke depan makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMK demikian banyak dan luas, terlebih lagi daerah tertinggal terisolir dan perbatasan serta kultur masyarakat yang beraneka ragam di lapangan.

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi, karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi ,tapi dapat juga dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Pada beberapa koperasi juga dapat dilihat berbagai permasalahan kelembagaan, usaha dan keanggotaan yang masih perlu pembinaan dan penataan nya secara lebih baik.

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi, sebagian besar masih sangat rendah dan terbatas. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi ditengah masyarakat, karna masih banyak koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Perdagangan, Koperasi dan UMK juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas SDM. Kebanyakan SDM koperasi dan UMK berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, dan kompetensi,kewirausahaan manajemen yang seadanya. Langka perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat, serta revitalisasi lembaga diklat, baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMK adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMK kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana prasarana serta informasi pasar.

Dalam hal pendanaan utamanya Perdagangan, Koperasi dan UMK memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administarsi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi usaha mikro dan kecil seringkali terjat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Perdagangan, Koperasi dan UMK, bahkan hampir 10 tahun terakhir, saat ini baru dapat diantisipasi melalui rekrutmen tenaga pendamping koperasi dilapangan pada tahun 2011 yang dibiayai melalui APBN Prov Riau. Namun dipandang perlu penambahan dan peningkatan kompetensi bagi setiap aparat, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu apabila terjadi mutasi dan yang pensiun.

3. PELUANG (OPPORTUNITY)

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK ini telah menemukan momentum yang tepat, yaitu ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian domestik dan nasional.

Prospek kemajuan pembangunan daerah juga cenderung terbuka, krisis ekonomi diperkirakan mulai pulih, kondisi ini juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat dan memungkinkan pula tumbuhnya usaha sektor riil masyarakat, mengingat Kabupaten Kampar sebagai barometer pembangunan Provinsi Riau kedepan.

Seiring dengan itu telah terjadi perubahan sturuktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan Investasi bagi UMK. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha Perdagangan, Koperasi dan UMK terutama dibidang Agrobisnis, Agroindustri.

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam, terutama pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Perdagangan, Koperasi dan UMK.

Dibidang permodalan, pengembangan potensi masih memungkinkan terbuka, untuk menjadikan UKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro di pedesaan, melalui berbagai program pemerintah. Selain itu juga tersedia plafon kredit yang cukup besar melalui skema kredit Dana Bergulir dari Pemerintah Daerah. Dan Lembaga Keuangan Bank.

4. ANCAMAN (TREATH)

Kondisi Perdagangan, Koperasi Dan UMK hingga saat ini memang belum menampakkan kemampuannya dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing untuk menghasilkan produk yang dapat di pasarkan dengan baik di pasar domestic dan pasar Internasional, Sehingga dapat dikategorikan Koperasai dan UMK Kabupaten Kampar berada pada kelompok konsumen bukan produsen.

Hal ini di tandai dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang di alami oleh produk Perdagangan, Koperasi dan UMK. Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha Perdagangan, koperasi dan UMK, terbentur oleh produk jasa Lembaga Keuangan yang sebagian Besar berupa kredit modal kerja bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Perdagangan, Koperasi dan UMK keadaan ini akan mempersulit Upaya Produk unggulan yang berdaya saing.

Permasalahan lain yang mempengaruhi perkembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini berkaitan dengan penataan lokasi usaha, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan bagi usaha mikro dan kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu eksistensi Perdagangan, koperasi dan UMK juga selalu masih di pandang sebelah Mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK seolah pemberdayaan adalah bagian dari program tambahan dan belas kasihan.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK pada tahun 2017-2022 juga akan menghadapi tantangan, untuk berperang mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar daerah (Terutama daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan).

Dengan pemahaman yang jernih terhadap potensi dan permasalahan Perdagangan, koperasi dan UMK tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebersamaan dan kebangsaan, bahwa keberadaan Perdagangan, koperasi dan UMK merupakan alat yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi regional dan

nasional. Konon katanya di beberapa negara maju, Perdagangan, Koperasi dan UMK menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintahan.

Selain dari pada itu bahwa Perdagangan, Koperasi dan UMK juga berkaitan erat dengan upaya mencapai millenium development Goals (MDG S) Atau tujuan pembangunan millenium, yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap Bangsa Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan pemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan Global dalam pembangunan terutama dengan mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda. Kabupaten kampar sebagai barometer Provinsi, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah yang perlu di topang oleh kekuatan ekonomi lokal yang sepadan, sehingga 5 (Lima) Pilar penopang Pembangunan Kabupaten Kampar berdiri kokoh dengan harapan mengakar kesuatu Realitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Momentum yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian daerah berlandaskan pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan dari sebuah cita-cita masa depan. Meskipun demikian, disadari bahwa keberadaan usaha besar di daerah merupakan mitra penting dalam pembangunan ekonomi rakyat. Oleh karena itu perlu pengembangan berbagai bentuk kerja sama dengan usaha besar yang di fasilitasi daerah, diantaranya pengembangan kemitraan jaringan pasar bersama Perdagangan, Koperasi dan UMK, tempat magang, alih teknologi, pendampingan dan advokasi serta CSR (Coorprate Sosial Responsibility). Dengan prinsip kerja sama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.

Dengan demikian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar bertujuan melakukan penyelarasan yang berkesesuaian dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang tetap berlandaskan, Tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar. Kesemuanya itu tidak terpisahkan dalam kerangka mekanisme maupun sistem rencana pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Penyusunan RPJM daerah berpedoman pada RPJP Daerah, dengan memperhatikan RPJM, RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan , yang disertai

dengan rencana kerja/kegiatan dalam koridor kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan/anggaran yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah dijabarkan dalam RKPD, dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana kerja pendanaanya, baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Oleh karenanya perlu disusun dokumen rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 2017-2022, Untuk dijadikan sebagai kerangka acuan/pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menggapai sebagian dari sebuah harapan yang menjadi cita-cita RPJM Kabupaten Kampar 2017-2022.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang dijelaskan pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel. 3.28 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah BUMDES aktif	240	242	102

Sumber data : Bidang UED,SDA dan TTG

Sasaran Kinerja pada tahun 2021 tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa Total Pagu Rp. 90,024,715,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 67.470.190,- Rp. atau 74,95%,-
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa dengan pagu Rp. 68.787.516,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 48.635.516,- Rp. atau 70,70%,-

Target utama pembinaan BUMDES di Kabupaten Kampar adalah 242 Desa. Dalam pelaksanaannya terdapat 238 BUMDes yang aktif melaksanakan pengelolaan BUMDes secara berlanjut dan terdapat 3 (tiga) yang tidak aktif, tolak ukur aktif atau tidaknya pengelolaan BUMDes dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Pengurus tetap BUMDes dengan Manajemen yang jelas dan baik
2. Adanya unit usaha BUMDes
3. MDPT tidak menjadi ukuran aktif atau tidaknya suatu BUMDes

Misi Kelima : Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industry Pengolahan yang Maju

Pada misi kelima terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 3 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
3. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kelima adalah:

Sasaran 1	Meningkatkan destinasi wisata
------------------	--------------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.29
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Jumlah objek daya tarik wisata	84	84	107	107	90	88	97,77%	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								97,77	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah jumlah objek daya tarik wisata mencapai hasil 97,77% atau dengan kategori memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah objek daya tarik wisata

Pada tahun 2021, jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Kampar bertambah 6 ODTW dari target yang ditentukan sebanyak 8 ODTW atau dengan capaian sebesar 97,77%, dengan kategori Memuaskan (AA). Tidak tercapainya target indikator kinerja ini akibat adanya pengurangan dana akibat refocusing untuk penanggulangan COVID-19.

Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan yang berhasil direhabilitas pada tahun 2021 sebanyak 14 unit, sedangkan jumlah event pariwisata dan kebudayaan yang ditargetkan tahun 2021 sebanyak 24 event, sampai akhir tahun telah dapat dilaksanakan sebanyak 16 event atau 66,66%.

Sasaran 2	Pemasaran dan promosi wisata
------------------	-------------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/		Target Akhir RPJMD
								Tidak		
Jumlah kunjungan wisata (org)	733.918	954.094	1.188.727	1.188.727	1.188.727	1.098.033	92,37	^		
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								92,37%	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisata (org) mencapai hasil 92,37% atau dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah kunjungan wisata

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kampar mencapai 1.098.033 orang wisatawan domestik tanpa adanya wisatawan asing dari target 1.188.727 orang atau dengan capaian sebesar 92,37%, dengan kategori memuaskan (AA). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing sebanyak 232.355 orang dari jumlah yang ditargetkan tanpa adanya wisatawan asing, nihilnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Kampar dikarenakan :

1. Adanya wabah pandemic Covid-19 dari bulan Maret s/d Desember 2020 hingga 2021;
2. Masih kurang memadainya infrastruktur, sarana dan prasarana dilokasi objek wisata;
3. Dana pengelolaan untuk jaringan listrik, fasilitas umum, kreativitas masyarakat masih kurang

4. Kesiapan masyarakat dalam menyambut wisatawan nusantara/mancanegara masih kurang;
5. Faktor ekonomi dan sumber daya manusia pariwisata masih kurang dan perlu dilakukan dukungan anggaran terhadap program pariwisata kedepan.

Sasaran 3	Meningkatkan pembangunan industri
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut

Tabel 3.31
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
	Persentase Pertumbuhan Industri	0	2.920	8.63%	4.35	5,38	5,38	100	V
Rata-Rata Capaian Tahun 2021								100%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian sasaran Meningkatkan Pembangunan Industri mencapai hasil 115% dengan kategori memuaskan.

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Pertumbuhan Industri

Indikator persentase pertumbuhan industri tahun 2021 terealisasi sebesar 5,38% dari target 5.38%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan industri mencapai target karena dilakukan pendataan terhadap IKM yang ada di kabupaten Kampar, adanya pembinaan untuk membentuk IKM baru dan selalu meningkatkan mutu dan jenis produk IKM. Untuk tetap mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Kampar, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha industri dan memberikan perhatian lebih bagi pengusaha

industri dalam hal penyediaan sarana dan prasarana Industri. Selain itu bisa dengan melakukan pemusatan pembinaan dan pendataan yang lebih akurat sehingga pembinaan akan lebih terarah kedepannya.

Misi Keenam : Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya

Pada misi keenam terdapat 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 indikator kinerja sasaran (100%) tidak mencapai sasaran

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi keenam adalah:

Sasaran 1

Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.32
Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
							Tidak	
Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	4 Kasus	10 Kasus	NA	100	75	75	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2021							75	Baik Sekali

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, Capaian sasaran Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama mencapai hasil 75% dengan kategori Baik Sekali (A).

Penjelasan indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Diantara 4 kasus konflik beragama di Kabupaten Kampar Tahun 2021, 3 berhasil diselesaikan. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah :

1. Kasus Ceramah Ustad Zamzami Nas pada tanggal 20 April 2021 di Masjid Mujahiddin, Desa Kampung Panjang, Kampa (Terselesaikan)
2. Pembangunan Gereja tanpa ijin Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar (Terselesaikan)
3. Pembangunan 3 rumah ibadah di Desa sungai raja dan satu di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri (Terselesaikan)
4. Menghadiri surat undangan dari Kepala desa pongkai untuk Fkub agar dapat menindak lanjuti serta membahas mengenai Konflik agama rumah ibaadah yang terdapat di Desa Pongkai. (Tidak erselesaikan).

Sasaran 2	Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.33
Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Hasil 2021	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
							Tidak	
1. Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan di lestarikan	43	45	43	43	6	13,95	X	
	100	100	100	12	0	0	X	
2. Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di lestarikan								
Rata-Rata Capaian Tahun 2021							6,97%	Kurang

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, Capaian sasaran Memajukan dan Melastirikan Adat dan Budaya Daerah mencapai hasil 6,97% dengan kategori Kurang (D).

Penjelasan indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan.

Indikator jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan tidak tercapainya target ini disebabkan oleh Kekurangan Pagu anggaran membuat tidak terpenuhinya target dan Pelaksanaan pelestarian berupa pelatihan dan pembimbingan sekaligus pemberian bantuan alat musik.

Seni pertunjukan calempong merupakan salah satu keunikan nilai-nilai warisan budaya yang hadir di kabupaten Kampar khususnya desa Kuok. Kebudayaan masyarakat Kampar yang mendunia ini dibawa oleh para perantau dari zaman dahulu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kampar desa Kuok. Meskipun suku melayu bukanlah mayoritas di Kampar, namun seni pertunjukan calempong dapat berkembang. Apriyan D. Rakhmat dalam tulisannya mengenai “Pluralisme Kota Pekanbaru” menyebutkan bahwa Kota Pekanbaru adalah jantung pertemuan etnis dan suku yang ada di Riau.

Di Kabupaten Kampar, seni pertunjukan calempong menjadi pertunjukan wajib dalam setiap perayaan hari besar masyarakat Kampar. Saat itu pula masyarakat di kabupaten Kampar dari berbagai suku dan agama menyatu untuk merasakan indahnya budaya seni calempong yang biasanya diselenggarakan di desa-desa saat perayaan hari besar ninik mamak, acara festival budaya Kampar dan acara pesta pernikahan didaerah Kampar. Calempong juga kerap diundang untuk melakukan pertunjukan pada acara pernikahan dengan adanya pertunjukan seni calempong dapat menjadi yang nantinya diharapkan akan membawa kebudayaan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa calempong di Kabupaten Kampar masih memegang nilai-nilai budaya dari seni pertunjukan calempong.

Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di lestarikan

Indikator jumlah Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di lestarikan tidak tercapainya target ini disebabkan oleh Adanya keterbatasan dana mengakibatkan tidak teranggarkannya kegiatan tersebut.

Masjid Jami Air Tiris merupakan salah satu masjid tertua di Riau yang terletak di Kabupaten Kampar. Masjid yang dibangun pada tahun 1901 mempunyai keunikan karena dibangun tanpa menggunakan paku.

Masjid Jami Air Tiris merupakan masjid tertua di Kabupaten Kampar, Riau yang dibangun pada tahun 1901 masehi oleh seorang tokoh ulama atau ninik mamak nan dua belas suku bernama Engku Mudo Songkal. Arsitektur masjid ini menunjukkan perpaduan gaya arsitektur melayu dan cina dengan atap berbentuk limas. Keunikan masjid ini karna seluruh bagian bangunan terbuat dari kayu dan tanpa menggunakan paku. Sedangkan pada bagian dinding terdapat ornamen ukiran yang menyerupai ukiran di masjid Pahang, Malaysia. Dibagian luar masjid terdapat bak air yang didalamnya terendam batu besar yang mirip kepala kerbau.

Konon batu tersebut selalu berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya. Masjid ini selalu dikunjungi wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara seperti singapura, malaysia dan brunai darussalam terutama pada bulan ramadhan dan setelah hari raya idul fitri atau yang dikenal sebagai hari raya puasa enam.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Target kinerja keuangan secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 2.541.147.951.540,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.480.930.457.820,76 atau mencapai 97,63 persen. Bila dilihat dari realisasi Pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.364.490.612.308,33 realisasi pendapatan tahun 2021 naik sebesar Rp. 116.439.845.512 atau naik 4,7%. Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.34.

Tabel 3.34

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
I	PENDAPATAN DAERAH	2.541.147.951.540,00	2.480.930.457.820,76	97,63	2.364.490.612.380,33
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.757.666.950,00	267.611.965.076,34	100,32	245.867.035.956,75
	Pajak Daerah	141.913.003.373,00	146.101.632.400,00	102,95	114.156.064.087,00
	Retribusi Daerah	12.032.240.000,00	12.777.379.260,00	106,19	9.061.327.594,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.946.502.794,00	27.916.502.794,00	99,89	30.345.896.566,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.865.920.738,00	80.816.450.622,34	95,23	97.879.308.190,62
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.161.245.800.300,00	2.099.315.082.744,42	97,13	2.001.276.349.475,58
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.986.346.277.705,00	1.927.277.914.811,00	97,03	228.444.100.800,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.899.522.595,00	172.037.167.933,42	98,36	25.367.000.000,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.144.484.335,00	114.003.410.000,00	100,76	117.347.226.876,00
3.	Pendapatan Hibah	0,00	1.094.000.000,00	100,00	117.347.226.876,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	113,144.484.335,00	112.909.410.000,00	99,79	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.541.147.951.540,00	2.480.930.457.820,76	97,63	2.364.490.612.380,33

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.480.930.457.820,76 terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 Rp. **2.364.490.612.380,33** sebesar Rp. 116.439.845.440,4.

Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Anggaran sebesar Rp. **12.032.240.000,00** menjadi Rp. **12.777.379.260,00** dari Anggaran tersebut realisasi mencapai **106,19%**, sementara realisasi yang tertinggi bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah dari anggaran sebesar Rp. **2.161.245.800.300,00** dengan realisasi sebesar Rp. **2.099.315.082.744,42** dengan persentase sebesar **97,13 %** selanjutnya realisasi terendah yaitu dari pendapatan *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah* 1) dengan anggaran sebesar Rp. **84.865.920.738,00** dengan capaian realisasi sebesar Rp. **80.816.450.622,34** dengan kata lain sebesar **95,23 %**.

2. Permasalahan dan solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang

tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum pokok permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada pajak daerah;
- 2) Dana perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat;
- 3) Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- 4) Porsi PAD terhadap total pendapatan masih rendah dan belum optimal;
- 5) Adanya perubahan kewenangan terkait Pajak Asli Daerah;
- 6) Belum optimalnya penegakan peraturan tentang Pajak Asli Daerah;
- 7) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Asli Daerah;
- 8) Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum dapat digali.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, berikut upaya-upaya pemecahan masalah adalah:

- 1) Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah;
- 2) Membanguna program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan pendapatan sebagai penunjang bagi pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tepat sasaran;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 5) Perlu dilaksanakan mapping potensi retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada;
- 6) Perlu dioptimalkan pengelolaan BUMD dengan meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada;
- 7) Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, disamping penerapan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

3. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.502.013.633.916,14 atau 94,51 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.647.390.998.717,00 dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp. 145.377.364.800,86. Realisasi belanja Tahun 2021 lebih besar Rp. 4.146.840.195,83 dibanding dengan realisasi belanja pada tahun 2020. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

URAIAN REKENING	TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI 2020
	ANGGARAN	REALISASI	%	
BELANJA DAERAH	2.647.390.998.717,00	2.502.013.633.916,14	94,51	2,497,866,793,720.31
BELANJA OPERASI	1.943.464.481.617,00	1.826.649.692.549,14	93,99	1,361,171,828,084.00
Belanja Pegawai	1.005.574.694.909,00	980.252.571.587,00	97,48	942,843,640,945.00
Belanja Barang dan Jasa	838.558.360.515,00	753.574.368.877,14	89,87	711.138.619.155,33
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	79.641.426.193,00	74.248.252.085,00	93,23	23,685,576,296.00
Belanja Bantuan Sosial	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33	0.00
BELANJA MODAL	345.853.815.763,00	320.291.159.917,00	92,61	425.556.346.479,98
Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87	1.314.306.030,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.576.224.298,00	106.004.696.908,00	93,33	113.508.592.543,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.988.523.874,00	51.494.311.363,00	85,84	77.581.973.550,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.195.380.732,00	145.332.172.309,00	94,87	192.880.990.351,53
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.452.558.017,00	16.334.026.377,00	99,28	40.270.484.004,00
Belanja Modal Aset Lainnya	132.000.000,00	-	-	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78	11,798,042,545.00
Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78	11,798,042,545.00
BELANJA TRANSFER	353.067.700.960,00	351.680.498.418,00	99,61	382.844.568.298,00
Belanja Bagi Hasil	13.935.415.057,00	13.935.415.056,00	100,00	12.844.826.571,00
Belanja Bantuan Keuangan	339.132.285.903,00	337.745.083.362,00	99,59	369.999.741.727,00
SURPLUS/DEFISIT	(106.243.047.177,00)	(21.083.176.095,38)	19,84	(133.189.635.501,58)
PEMBIAYAAN DAERAH	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59	230.932.112.320,17
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59	230.932.112.320,17
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.243.047.177,59	96.243.047.177,59	100,00	97.742.476.818,59
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	-	-	-

URAIAN REKENING	TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI 2020
	ANGGARAN	REALISASI	%	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
SILPA	0,59	75.159.871.082,21		96.243.047.177,59

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Kabupaten Kampar pada tahun 2021 naik sebesar Rp. 4.146.840.195,83 atau (0,17%) dibanding realisasi belanja di tahun 2020.

A. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal.

Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 106.243.047.177,59 dengan realisasi sebesar Rp. 96.243.047.177,59 (90,59%), dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 106.243.047.177,59 dengan realisasi Rp. 96.243.047.177,59 (90,59%), perolehan penerimaan pembiayaan ini didapat dari sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 96.243.047.177,59.

1. Permasalahan dan Solusi

Walaupun Realisasi belanja daerah telah mencapai 94,51% akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah sepanjang tahun 2021, antara lain:

- 1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan asset daerah;
- 2) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas bulan). Hal ini disebabkan masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah;
- 3) Realisasi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatalan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, di prioritaskan kegiatan dengan skala layanan dan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

- 4) Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang proses pengerjaannya terlambat karena Proses administrasi pelelangan, kondisi iklim/cuaca dan kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian beberapa kegiatan.

**BAB
IV****PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja, disimpulkan bahwa:

- a. Misi I terdiri atas 6 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 99,93% dengan kategori Memuaskan.
- b. Misi II terdiri atas 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 112,81% dengan kategori Memuaskan.
- c. Misi III terdiri atas 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 143,30% dengan Memuaskan.
- d. Misi IV terdiri atas 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 2.934,38% dengan kategori Memuaskan.
- e. Misi V terdiri atas 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 96,71% dengan kategori Memuaskan.

- f. Misi VI terdiri atas 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, rata-rata capaian adalah 40,98% dengan kategori Kurang.

Secara umum seluruh capaian kinerja pada tahun 2021 telah memberikan arah bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang secara berkesinambungan. Rata-rata hasil pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 571,35% maka Pemerintah Kabupaten Kampar dikategorikan *Memuaskan* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi meskipun capaian ini masih terbatas pada indikator kinerja yang dapat diukur.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja 2021, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Perbaiki perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai landasan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja setiap tahunnya secara lebih akurat dan cermat. Dengan demikian rencana kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, dapat diwujudkan dan diukur kinerjanya secara lebih akurat dengan hasil yang lebih optimal.
- 2) Menjadikan hasil kinerja tahun 2021 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun 2022 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target tahun 2022 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih pada tahun 2022.
- 3) Melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kerangka Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 5) Meningkatkan validitas dan mekanisme pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung oleh informasi yang akurat.
- 6) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk pelayanan.
- 7) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan dan agen perubahan.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.